PEMIKIRAN AZYUMARDI AZRA TENTANG PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

ABDUL MUID, ¹MOH. RIDWAN.²

ABSTRAKSI

Sejalan dengan tren kajian Islam yang semakin multi dimensional perkembangan Islam di Indonesia menampakkan kecenderungan yang semakin terbuka. Respon kaum muslimin Indonesia terhadap modernisme diaktualisasikan sedemikian rupa sehingga mampu menampilkan wajah Islam yang plural, demokratis dan inklusif. Problem hubungan agama dan Negara diselesaikan melalui pendekatan simbiotik dengan menempatkan agama secara proporsional dalam konsep Negara Bangsa.

Perkembangan sebagaimana digambarkan diatas bukanlah capaian yang terjadi begitu saja. Sejarah penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia sejak masa awal telah menyediakan pengalaman-pengalaman empirik yang berharga. Sepanjang sejarah telah muncul berbagai pemikiran dan eksperimentasi pelembagan Islam di Indonesia dalam berbagai bidang. Kenyataannya mengajarkan bahwa pola pengembangan Islam diwilayah ini menunjukkan keanekaragaman antar lokasi.

Dalam masa yang cukup panjang, pendidikan Islam di Indonesia berada dipersimpangan jalan antara mempertahankan tradisi lama dan mengadopsi perkembangan baru. Upaya mempertahankan sepenuhnya tradisi lama berarti status quo yang menjadikannya terbelakang meskipun memuaskan secara emosional dan romantisme dengan identitas pendidikan Islam masa lalu. Sementara itu, mengadopsi perkembangan baru begitu saja berarti mengesampingkan akar sejati dan niali autentik dari sejarah pendidikan Islam, walaupun berhasil memenuhi keperluan pragmatis untuk menjawab tantangan sesaat dari lingkungan sekitarnya, situasi ini tercermin dalam kebingungan, maju mundur, dan ketidak jelasan arah dan tujuan pembaharuan pendidikan Islam selama ini.

Kata Kunci :Pemikiran Azumardi Azra, Pembaruan Pendidikan Islam

¹Dr.H.Abdul Muid,S.Ag.M.Pd.I adalah dosen dan Direktur Pascasarjana IAI Qomaruddin Bungah Gresik Jawa Timur, dosen STAI Arrosyid Surabaya, Ketua Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Boboh Gresik,Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon NU Driyorejo Gresik, Anggota LAKPESDAM NU Gresik,Anggota KOMNASDIK Jawa Timur, dan Wakil Ketua LPTNU Kabupaten Gresik Jawa Timur.

²² Mahasiswa IAI Qomaruddin Program Pascasarjana

A.BAGIAN KE I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus asset bagi pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, ia merupakan amanat dari masa kemasa. Sedangkan sebagai asset, pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Dalam dua perspektif diatas, pendidikan Islam di Indonesia selalu menjadi lahan pengabdian kaum muslimin dan sekaligus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Mendiskusikan masalah pendidikan Islam di Indonesia secara garis besar terbagi kedalam dua tingkatan: makro dan mikro. Pada level yang pertama, pendidikan Islam bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional dan faktor-faktor eksternal lain. Sedangkan pada level yang kedua, pendidikan Islam dihadapkan pada tuntutan akan proses pendidikan yang efektif yang menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Berbagai persoalan dari kedua level diatas pada prinsipnya mendorong adanya perubahan arah pendidikan Islam mengingat tantangan kontemporer dan tantangan masa depan yang berbeda dengan tantangan masa lalu. Dalam uraian berikut akan dikemukakan secara sekilas latar belakang dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebagai wawasan untuk melakukan perubahan.³

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang, dalam pengertian seluas-luasnya. Pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat arab, dimana Islam lahir dan pertama kali berkembang. Kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan. Untuk tidak menyebut sistem merupakan transformasi besar, sebab masyarakat arab pra Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal.

Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan umumnya bersifat informal, dan inipun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah. Penyebaran dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Dalam kaitan itulah dapat dipahami kenapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah sahabat tertentu yang paling terkenal adalah Dar Al-Arqom. Tetapi ketika masyarakat Islam telah terbentuk, maka pendidikan diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam halaqah lingkaran belajar.

³Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam, Logos, Jakarta; 2001, hlm. 4

Pendidikan formal Islam baru muncul pada masa lebih belakangan, yakni dengan kebangkitan madrasah. Secara tradisional sejarawan pendidikan Islam, seperti Munir Uddin Ahmad, George Makdisi, Ahmad Syalabi, dan Michel Stanton menganggap bahwa Madrasah pertama didirikan oleh Wazir Hizham Al-Mulk pada 1064, Madrasah ini kemudian terkenal dengan madrasah Nizam al-Mulk. Tetapi penelitian lebih akhir, misalnya yang dilakukan oleh Richard Bulliet mengungkapkan eksistensi Madrasah lebih tua di kawasan Nishapur Iran. Pada sekitar tahun 400/1009 terdapat madrasah di wilayah Persia, yang berkembang dua abad sebelum Madrasah Nizhamiyah yang tertua adalah Madrasah Miyah Dahiyah yang didirikan Abu Ishaq Ibrahim Ibn Mahmud di Nishapur. Pendapat ini didukung sejarawan pendidikan Islam Naji Ma'ruf, yang menyatakan bahwa di Khurasan telah berkembang madrasah 165 tahun sebelum kemunculan Madrasah Nizhamiyah.⁴

Jika dipandang semata-mata dari sudut keagamaan intern pendidikan Islam mencakup berbagai muatan nilai di dalamnya. Pengertian pertama dapat di tampilkan bahwa pendidikan Islam adalah semua jenis pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Islam.⁵ Pengertian kedua, pendidikan Islam adalah semua lembaga pendidikan yang mungkin memberikan kontribusi paling dominan pada proses “pembumihan” ajaran Islam baik institusi pendidikan yang secara eksplisit berdiri di atas label pendidikan Islam Maupun institusi pendidikan umum tetapi secara implisit berdimensi dan atau berciri khas keagamaan.⁶

Meski Islam pada dasarnya tidak membedakan nilai ilmu-ilmu agama dengan ilmu non agama. Tetapi dalam prakteknya supremasi lebih diberikan kepada ilmu agama, ini sebabnya sikap keagamaan dan kesolehan yang memandang ilmu agama “Sebagai Jalan Tol” menuju Tuhan, memang sebelum kehancuran aliran teologi Teologi Mu'tazilah pada masa Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun mempelajari ilmu-ilmu umum yang bertolak dari nalar dan kajian-kajian empiris bukan sesuatu yang tidak ada sama sekali dalam kurikulum Madrasah. Tetapi dengan pemakruhan untuk tidak menyatakan pengharaman penggunaan nalar setelah runtuhnya Muktazilah, ilmu-ilmu umum yang sangat dicurigai itu di hapuskan dari kurikulum madrasah; mereka yang cenderung dan masih berminat kepada ilmu-ilmu umum itu, terpaksa mempelajari secara sendiri-sendiri, atau bahkan dibawah tanah, karena mereka dipandang sebagai ilmu-ilmu “subversif” yang dapat dan akan menggugat kemapanan doktrin mapan sunni, terutama dalam bidang kalam dan fiqih.⁷

Tetapi jika dilihat dalam perspektif lebih luas supremasi ilmu agama menimbulkan dampak yang amat substansial, bukan hanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga peradaban Islam secara

⁴Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000. hlm. 26

⁵RD. H Abdullah bin Nuh, *Agama Dalam Pembahasan*, Jakarta, 1961, hal. 25

⁶E. Saifuddin Anshori, *Op. Cit.* hal 51

⁷Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000. hlm. 196

keseluruhan, secara keilmuan perkembangan semacam ini menciptakan dikhotomisasi dan antagonisasi sebagai cabang ilmu atau bentuk-bentuk pengetahuan, di pandang dari perspektif Islam pada akhirnya adalah satu dalam Islam tidak dikenal pemisahan esensial antara ilmu agama dengan ilmu profane. Berbagai ilmu dan perspektif intelektual yang dikembangkan dalam Islam memang mempunyai satu hirarki tetapi hirarki itu akhirnya bermuara kepada pengetahuan tentang “Yang Maha Tunggal” substansi dari segenap ilmu. Inilah alasan kenapa para ilmuwan muslim berusaha mengintegrasikan ilmu-ilmu yang dikembangkan peradaban-peradaban lain kedalam skema hirarki ilmu pengetahuan menurut Islam.

Menurut para pemikir keilmuan dan ilmuwan muslim di masa-masa awal membagi ilmu-ilmu pada intinya kepada dua bagian yang di ibaratkan dari dua sisi dari satu mata koin. Jadi esensinya tidak dipisahkan dari yang pertama adalah Al-Ulum Al-Naqliyyah, dan yang kedua adalah Al-Ulum Al-Aqliyah yang berkembang dalam peradaban Islam yang sekaligus berkaitan dengan kemajuan seluruh aspek atau bidang-bidang keilmuan. Kedua bentuk ilmu ini, secara bersama-sama disebut *al-'ulum al-hushuli*, yaitu ilmu-ilmu perolehan. Walau terdapat integralisme keilmuan seperti ini, setidaknya pada tingkat konseptual, tetapi pada tingkat yang lebih praktis, tak jarang terjadi disharminisasi antara keduanya, atau lebih tegas lagi antara wahyu dan akal atau antara ilmu-ilmu agama dengan sains. Untuk mengatasi disharmonisasi ini berbagai pemikir dan ilmuwan muslim memunculkan klasifikasi ilmu-ilmu lengkap dengan hirarkinya.

Dengan demikian, akar-akar keterbelakangan dan ketertinggalan dunia muslim dalam sains dan tehnologi dapat dilacak kepada lenyapnya berbagai cabang ilmu-ilmu ‘aqliyah dari tradisi keilmuan dan pendidikan muslim. Pada saat yang sama ilmu-ilmu ‘aqliyah tadi mengalami transmisi kedunia eropa untuk selanjutnya mereka kembangkan sehingga mendorong terjadinya pencerahan (*aufklarung*), yang pada akhirnya menghasilkan renainsans dan revolusi industri.

Bisa dibayangkan kaum muslim sangat terperangah ketika tidak mampu berbuat banyak untuk menangkis kekuatan eropa. Secara teologis ini menimbulkan krisis kaum muslim yang disebut sebagai “*khayru ummah*” (umat terbaik) dengan begitu mudah dikalahkan orang-orang kafir. Ada sesuatu yang salah dalam situasi ini para pemikir Islam menyatakan secara apologetis, tidak ada sesuatu pun yang salah dengan Islam itu sendiri, yang keliru adalah umatnya yang tidak bisa menangkap tertanda zaman.

Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi masyarakat Islam dewasa ini, dalam rangka resistensi terhadap pembaharuan, maka harus bisa bersaing dan mengejar ketertinggalan yang ada. Proses historis yang ditempuh dalam pendidikan tinggi Islam merupakan cermin yang seyogyanya menimbulkan refleksi yang pada gilirannya akan menggerakkan upaya-upaya kreatif dalam kerangka membangun kembali peradaban Islam.

Dengan demikian pembaharuan sepenuhnya harus berhasil menciptakan keseimbangan keilmuan, dengan membangkitkan kembali bidang ilmu-ilmu alam dan eksakta, yang dibutuhkan untuk membangun kembali

peradaban Islam ditengah dominasi politik, ekonomi, kultur dan intelektual barat. Senang atau tidak, masa depan dunia muslim tergantung banyak pada kemampuan dan keberhasilan memajukan sains dan teknologi. Dan ini, pada gilirannya sangat tergantung pada peningkatan kualitas lembaga-lembaga pendidikan tinggi di dunia muslim itu sendiri.

Life is education and education is life (Ruper C.Logde; 1974) Pendidikan tidak akan punya arti bila manusia tidak ada didalamnya. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan subyek dan obyek pendidikan. Artinya, manusia tidak akan bisa berkembang dan mengembangkan kebudayaannya secara sempurna bila tidak ada pendidikan. Untuk itu tidak berlebihan jika dikatakan ,bahwa eksistensi pendidikan merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi meneruskan dan mengekalkan (mengharmonisasikan) kebudayaan lama dengan kebudayaan baru secara proporsional dan dinamis.⁸

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan, harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Memang pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan membuat generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka.

Penulis tertarik pada masalah ini paling tidak ingin memberikan gambaran tentang kompleksitas yang dihadapi pendidikan Islam dewasa ini. Proses-proses historis yang ditempuh pendidikan tinggi Islam merupakan cermin yang seyogyanya menimbulkan refleksi yang pada gilirannya akan menggerakkan upaya-upaya kreatif dalam rangka membangun kembali peradaban Islam.

Tantangan abad ke-21 bagaimanapun menuntut respon yang tepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan. Jika kaum muslimin termasuk di Indonesia tidak hanya ingin sekedar survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tapi juga berharap mampu tampil ke depan, maka reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan restrukturisasi sistem dan kelembagaan jelas merupakan keniscayaan, cara pandang yang menganak tirikan iptek tampak tidak bisa di pertahankan lagi.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Ingin menjelaskan arti pembaharuan pendidikan Islam itu.
 - b. Ingin menjelaskan dasar dan tujuan pembaharuan Pendidikan Islam.
 - c. Ingin menjelaskan proses pembaharuan pendidikan itu berlangsung.
2. Kegunaan
 - a. Dapat Menjelaskan arti pembaharuan pendidikan Islam itu.
 - b. Dapat menjelaskan dasar dan tujuan pembaharuan Pendidikan Islam.
 - c. Dapat menjelaskan proses pembaharuan pendidikan itu berlangsung.

C. Definisi Operasional

⁸ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Kencana, Jakarta: 2007; hlm. v

Guna menghindari terjadinya kesalahan terhadap maksud judul ini, maka diuraikan pengertian istilah-istilah yang terkandung di dalam hubungan istilah yang satu dengan lainnya.

1. Pemikiran Azyumardi Azra: Gagasan yang dikemukakan Azyumardi Azra untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu.⁹
2. Tentang: Sesuatu, Perihal.¹⁰
3. Pembaharuan Pendidikan: Cara memperbaharui sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.¹¹

Dari penjelasan kata demi kata di atas pengertiannya adalah gagasan Azyumardi Azra dalam upaya pembaharuan pendidikan Islam.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan filosofis.

Adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Metode kualitatif yaitu suatu data tidak langsung terwujud dalam angka, tetapi dalam bentuk konsep-konsep atau pengertian yang abstrak.
- b. Metode diskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat sesuatu.¹²
- c. Metode filosofis yaitu prosedur permasalahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui pemikiran atau perenungan yang terarah, mendasar dan mendalam tentang hakikat sesuatu.¹³

Jenis penelitian ini murni Library Research (riset perpustakaan) dengan menggunakan metode pendekatan-pendekatan diatas. sedangkan bahan yang dijadikan sumber primer adalah buku-buku tentang pendidikan dan sumber lain (sekunder) yang menjelaskan tentang hal-hal yang sama kaitannya dengan tema tersebut.¹⁴

⁹ Ibid, hal. 204

¹⁰ Ibid, hal. 860

¹¹ Ibid, hal. 340

¹² Imam bernadp, *Pemikiran Tentang Pendidikan*, Andi Offset, Jakarta 1983, hal 29

¹³ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, UGM Pers. Cetakan 7. Jakarta 1995. hal 62

¹⁴ Winarno Surahman, *Pengantar Ilmiah Penelitian Dasar*, Tarsito, Bandung 1987, hal 106

B.BAGIAN YANG KE II. PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Memahami Makna Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam

1. Pengertian Pembaharuan Pendidikan Islam

Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini terjadi reduksi pemaknaan pendidikan yang diartikan sebagai sesuatu yang identik dengan persekolahan. Sekolah kemudian direduksi lagi menjadi percikan-percikan makna dalam bentuk kurikulum dan GBPP. Selanjutnya GBPP ini direduksi lagi dalam makna kering berupa satuan pelajaran (satpel). Akibatnya penghargaan masyarakat kepada pendidikan juga kering dan bersifat atributif. Reduksi pemaknaan ini merupakan indikator pendangkalan visi dan misi pendidikan dan SDM. Bertolak dari kenyataan tersebut, visi baru pembaharuan (reformasi) pendidikan dan SDM pada hakikatnya adalah terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sesuai dengan amanat proklamasi kemerdekaan 1945 yang bertekad untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia sebagai suatu masyarakat Pancasila yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, dan kooperatif dan kompetitif serta memiliki kesadaran dan solidaritas antar generasi dan antar bangsa.

Hampir menjadi semacam kesepakatan umum, bahwa peradaban masa depan adalah peradaban yang dalam banyak hal didominasi ilmu (khususnya sains) yang pada tingkat praksis dan penerapan menjadi teknologi. Tanpa harus menjadikan sains sebagai ‘pseudo-religion’, jelas bahwa maju atau mundurnya suatu masyarakat di masa kini dan mendatang banyak ditentukan oleh penguasaan dan kemajuan sains khususnya. Meski masa kini yang sedang datang disebut sebagai zaman globalisasi, tetapi sejauh menyangkut sains dan teknologi, globalisasi dalam kedua bidang ini tetap terbatas. Negara-negara paling terkemuka dalam sains dan teknologi tidak begitu saja memberikan informasi atau melakukan transfer sains dan teknologi kepada Negara-negara berkembang. Universitas-universitas terkemuka di Jepang misalnya, sangat keberatan menerima orang non Jepang untuk mendalami elektronika, karena bidang yang menjadi tulang punggung teknologi Jepang ini hanya

diperuntukkan bagi pribuminya. Dengan demikian, tantangan bagi masyarakat-masyarakat muslim dibagian dunia manapun untuk mengembangkan sains, sesuai dengan ciri sebagai pendidikan agama, secara ideal pendidikan Islam berfungsi dalam penyiapan SDM yang berkualitas tinggi, baik dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam hal karakter, sikap moral, dan penghayatan dan pengalaman ajaran agama, singkatnya pendidikan Islam secara ideal berfungsi membina dan menyiapkan anak didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan tinggi dan sekaligus beriman dan beramal sholeh.¹⁵

Tetapi dengan jujur harus kita akui, pendidikan Islam hingga saat ini kelihatan sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat kita sekarang dan masa datang. System pendidikan Islam kebanyakan masih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi, dan matematika modern, padahal keempat ilmu ini mutlak di perlukan dan pengembangan teknologi canggih. Ilmu-ilmu eksakta ini belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam system pendidikan Islam.

Karena itu, sudah saatnya bagi kita untuk lebih serius menangani pembaharuan dan pengembangan system pendidikan Islam. Selama ini usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh. Sebab usaha pembaharuan atau peningkatan itu dilakukan sekenannya atau seingatnya, maka tidak terjadi perubahan sesesial dalam sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan atau kurang bersifat future oriented.

Selain itu, kalau kita mau jujur, sebageian besar system pendidikan Islam belum lagi dikelola sesuai dengan pemikiran pendiri Muhammadiyah, almarhum Ahmad Dahlan dengan ungkapannya yang populer “hidup-hidupilah muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah” semangat “keikhlasan” sangat ditekankan dalam ungkapan ini, tetapi tanpa harus mengorbankan semangat keikhlasan dan jiwa pengabdian, sudah waktunya system dan lembaga pendidikan Islam dikelola secara professional, bukan hanya soal penggajian, pemberian honor, tujuan atau pengelolaan administrasi keuangan, profesionalisme mutlak pula diwujudkan dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum dan pelaksanaan dan perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri.

Akibat pengelolaan yang pada umumnya tidak profesioanal itu pendidikan Islam, harus kita akui, sering kalah bersaing dalam banyak segi dengan sub system pendidikan nasional yang diselenggarakan kelompok-kelompok masyarakat lain.¹⁶ Bukan rahasia, bahwa citra dan gengsi

¹⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Logos wacana ilmu, Jakarta, 2000. hlm. 11

¹⁶ Ibid, hlm. 60

lembaga pendidikan Islam sering dipandang lebih rendah dibandingkan dengan system pendidikan yang diselenggarakan pihak-pihak lain. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa menyalahkan orangtua muslim yang menyerahkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan lain, selama semua pihak yang terlibat dalam system pendidikan Islam tidak berikhtiar secara serius, sistematis, komprehensif dan programatis membenahi dan mengembangkan system pendidikan Islam itu sendiri.

Jika beberapa kelemahan tidak segera diatasi, maka agak sulit bagi kita untuk mengharapkan system dan lembaga pendidikan Islam bisa benar-benar fungsional dalam ikhtiar penyiapan SDM yang berkualitas tinggi dan kompetitif untuk menjawab tantangan zaman. Pada hemat saya, berbagai perubahan segera dilakukan dalam system pendidikan, Islam.

Semua perkembangan inilah yang kemudian memunculkan fenomena baru gerakan Islam yang secara moderat dapat kita sebut sebagai upaya “revitalisasi Islam” sederhananya berarti “membangkitkan kembalinya Islam”. Revitalisasi Islam ini bertujuan tidak sekedar lebih menyelaraskan kehidupan muslimin dengan ketentuan-ketentuan syari’at, sempitnya didalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial lebih luas, termasuk dalam bidang ilmu tehnologi. Dalam kerangka inilah kita memahami kemunculan gagasan-gagasan tentang Islamisasi ilmu.

Perbincangan tentang Islamisasi ilmu dan tehnologi bukan tidak bermanfaat, ia dapat merupakan langkah awal untuk membangun paradigma Islam, bukan hanya pada tingkat masyarakat muslim, tetapi juga pada tingkat global. Ini seharusnya tidak membuat kaum muslim terutama kalangan ahli dan terpelajar mengabaikan masalah-masalah berat yang terdapat pada tingkat praksis yang tetap tidak atau belum terpecahkan diantaranya adalah:

a. Lemahnya masyarakat ilmiah

Salah satu prasyarat pokok pengembangan riset ilmiah dalam masyarakat manapun adalah terdapatnya jumlah minimal ilmuan (scientists) dan tenaga ahli (experts) yang mampu melakukan penelitian ilmiah yang kontinyu dan terarah. Jika masyarakat ilmiah tidak mencapai jumlah minimal itu, maka riset dan pengembangan ilmu tidak akan berjalan baik. Memang, tidak seluruh lulusan universitas dapat diharapkan memainkan peran penting, hanya sebagian kecil yang mampu melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan ilmu

b. Kurang integralnya kebijaksanaan sains nasional

Hampir seluruh Negara muslim tidak mempunyai kebijaksanaan (policy) dan perencanaan nasional yang jelas, menyeluruh, terpadu dan terarah untuk pengembangan sains. Bahkan sains, dalam banyak kasus, merupakan bidang yang paling terlantar dari kebijaksanaan nasional yang terlalu bertitik tekan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini kontras dengan Negara-negara maju, yang memberikan perhatian khusus kepada kebijaksanaan sains bahkan melebihi kebijakan luar

negeri atau militer, sebab kegagalan mengembangkan riset nasional dalam berbagai bidang ilmu, baik eksakta maupun sosial semacam fisika, matematika, kimia, biologi, sosiologi, sejarah, antropologi dan lain-lain dapat menghambat pengembangan secara menyeluruh dimasa depan.

- c. Tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah
Hampir di seluruh Negara Muslim, anggaran untuk pengembangan ilmu dan penelitian ilmiah sangat kecil, dan tidak menduduki tempat signifikan dalam anggaran nasional. Sebaliknya, anggaran militer pada umumnya mengambil bagian yang cukup besar dari anggaran nasional secara keseluruhan.
- d. Kurangnya kesadaran di kalangan sector ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah.
Negara-negara Muslim dalam kebijaksanaan pembangunan sangat mengorientasikan diri pada pembangunan ekonomi dengan titik tekan pada pertumbuhan. Karenanya, tidak heran kalau yang memegang kendali perumusan kebijakan pembangunan adalah ekonom yang sering kurang memiliki minat terhadap signifikansi pengembangan dan penelitian sains dan teknologi.
- e. Isolasi Ilmuwan.
Situasi lain yang menghambat pengembangan sains dan bahkan dapat melunturkan kemampuan saintis di Negara-negara Muslim adalah terisolasinya kaum ilmuwan dari perkembangan ilmu secara global. Mereka hampir tidak pernah atau jarang sekali berinteraksi dengan kaum ilmuwan di Negara-negara maju. Padahal, setiap ilmuwan agar dapat mengembangkan ilmunya perlu berpartisipasi dalam diskusi-diskusi, seminar, dan simposium pada tingkat local, regional dan international.
- f. Birokrasi, restriksi dan kurangnya insentif.
Sains jelas akan lebih berkembang dan bermanfaat bila ditangani dalam atmosfer yang bebas atau dengan restriksi-restriksi minimal. Jaringan-jaringan birokrasi yang terlalu ketat hanya akan membunuh kreatifitas dan lembaga riset di Negara-negara Muslim yang sering tidak dapat bergerak banyak karena birokrasi yang mencekam akibatnya yang berlangsung adalah kerutinan bukan kreatifitas. Selain itu tidak mendapatkan insentif financial dan moral yang memadai. Akibatnya, rasa tanggung jawab sebagai ilmuwan tidak tumbuh.

2. Perubahan fungsional antar sistem

- a. Ideologi normatif
Orientasi-orientasi ideologi tertentu yang diekspresikan dal norma-norma nasional menuntun system pendidikan untuk memperluas dan memperkuat wawasan nasional anak didik. Dalm kerangka ini; pendidikan dipandang suatu instrument terpenting bagi pembinaan "nation building". Sangat boleh jadi orientasi "ideologis" lama (katakanlah Islam) lambat atau cepat tergeser oleh orientasi nasional

baru tadi. Atau setidaknya, terjadi semacam situasi anomaly atau bahkan krisis identitas ideologis.

b. Mobilisasi politik

Kebutuhan bagi modernisasi dan pembangunan menuntut system pendidikan untuk mendidik, mempersiapkan dan menghasilkan kepemimpinan modernis dan inovator yang dapat memelihara dan bahkan meningkatkan momentum pembangunan Tugas yang terutama terpikul pada lembaga pendidikan tinggi mengharuskan untuk menerapkan kurikulum yang lebih berorientasi pada modernisme dan modernitas.

c. Mobilisasi ekonomi

Kebutuhan akan tenaga kerja yang handal menuntut system pendidikan untuk mempersiapkan anak didik menjadi SDM yang unggul dan mampu mengisi berbagai lapangan kerja yang tercipta dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak memadai lagi sekedar menjadi lembaga “transfer” dan trasmisi ilmu-ilmu Islam, tetapi sekaligus juga harus dapat memberikan ketrampilan (skill) dan keahlian (abilities).

d. Mobilisasi Kultural

Modernisasi yang menimbulkan perubahan-perubahan cultural menuntut sistem pendidikan untuk mampu memelihara stabilitas dan mengembangkan warisan kultural yang kondusif bagi pembangunan¹⁷. Dalam konteks ini pendidikan Islam, khususnya pesantren yang mempunyai sub kultur sendiri yang khas itu, semua ini berarti penilaian ulang terhadap lingkungan kulturalnya tersebut.

e. Mobilisasi Sosial

Peningkatan harapan bagi mobilitas sosial dalam modernisasi menuntut sistem pendidikan untuk memberikan akses dan venue ke arah tersebut. Pendidikan Islam, dengan demikian tidak cukup lagi sekedar pemenuhan kewajiban menuntut ilmu belaka, tetapi harus juga memberikan modal dan dengan demikian kemungkinan akses bagi peningkatan sosial.

Transformasi dengan mempertimbangkan semua variable di atas, pada gilirannya akan menghasilkan output pendidikan yang merupakan input bagi masyarakat sebagai berikut : sistem pendidikan yang diharapkan dapat menghasilkan output pendidikan yang merupakan input bagi masyarakat sebagai berikut :

1) Modernisasi Administratif

Modernisasi menuntut differensiasi system pendidikan untuk mengantisipasi dan mengakomodasi berbagai kepentingan differensiasi sosial, tehnik dan manajerial. Antisipasi dan akomodasi tersebut haruslah dijabarkan dalam bentuk formulasi, adopsi dan implementasi kebijaksanaan pendidikan dalam tingkat nasional, regional dan lokal.

¹⁷Marwan Saridjo *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, CV. AMISSCO, Jakarta. 1996. hlm. 4

Dalam konteks modernisasi administratif ini, sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, pada umumnya baru mampu melakukan reformasi dan modernisasi administratif secara terbatas. Kebanyakan masih berpegang pada kerangka “administrasi tradisional”, termasuk dalam aspek kepemimpinan, sehingga pesantren tidak mampu mengembangkan diri secara baik.

2) Differensiasi struktural

Pembagian dan difersifikasi lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan fungsi-fungsi yang akan dimainkannya. Dengan demikian, dalam masyarakat yang tengah mengalami proses modernisasi, lembaga pendidikan yang bersifat umum saja tidak lagi memadai. Lebih khusus lagi, sistem pendidikan Islam, seperti pesantren, haruslah memberikan peluang dan bahkan mengharuskan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan khusus yang diarahkan untuk mengantisipasi differensiasi structural yang harus dilakukan; apakah tetap dalam differensiasi keagamaannya (yang dilihat dalam kerangka modernisasi mungkin tidak memadai lagi) atau mengembangkan differensiasi di luar bidang itu, misalnya melalui “pesantren pertanian”, “pesantren agrobisnis”, “pesantren politeknik”, dan lain-lain.

3) Ekspansi kapasitas

Menyediakan pendidikan bagi sebanyak-banyaknya peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki sebagai sector masyarakat.¹⁸ Pada satu segi, sistem dan kelembagaan pendidikan Islam sebenarnya sudah sejak lama melakukan ekspansi kapasitas (termasuk dengan terus berdirinya banyak pesantren baru di berbagai tempat) sehingga pesantren dari sudut ini dapat disebut sebagai ‘pendidikan rakyat’ yang cukup memassal. Tetapi, pada pihak lain, ekspansi kapasitas itu terjadi tanpa memperhitungkan kebutuhan berbagai sector masyarakat, khususnya menyangkut lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya, banyak tamatan pesantren tidak mampu menemukan tempatnya yang “pas” dalam masyarakat.

Transformasi dengan mempertimbangkan semua variabel diatas, pada gilirannya akan menghasilkan output pendidikan yang merupakan input bagi masyarakat sebagai berikut:

a) Perubahan sistem nilai

Dengan memperluas peta “kognitif” peserta didik, maka pendidikan menanamkan nilai-nilai yang merupakan alternatif bagi sistem nilai tradisional. Perluasan wawasan ini akan merupakan pendorong bagi tumbuh dan berkembangnya “semangat untuk berprestasi” dan mobilitas sosial. Persoalannya kemudian, sejauhmana sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, yang secara sadar mengorientasikan diri pada perluasan “peta kognitif” ini; bahkan sebaliknya terdapat kesan yang kuat, bahwa pesantren tetap berkatat

¹⁸ Ibid, hlm. 6

pada “normativisme” dan dogmatisme lama yang kurang memberikan kesempatan bagi pengembangan kognisi dan kreativitas.

b) Output politik

Kepemimpinan modernitas dan innovator yang secara langsung dihasilkan sistem pendidikan dapat diukur dengan perkembangan kuantitas dan kekuatan birokrasi sipil-militer, intelektual dan kader-kader administrasi politik lainnya, yang direkrut dari lembaga-lembaga pendidikan terutama pada tingkat menengah dan tinggi. Disini, kepemimpinan yang dihasilkan lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya pada tingkat menengah seperti pesantren, kelihatannya sebagian besar masuk kedalam “kepemimpinan tradisional”, tegasnya kepemimpinan keagamaan, yang tentunya berhasil dicapai setelah mendapatkan “pengakuan” dari masyarakat. Sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi (dalam hal ini IAIN) selain melahirkan kepemimpinan tradisional tadi, tetapi dalam batas tertentu juga melahirkan intelektual dan birokrat, dan segelintir yang masuk ke lingkungan militer terutama menjadi “rohis” (rohani Islam) atau “binroh” (pembinaan rohani). Penyejajaran madrasah, melalui UUSPN 1989, dengan sekolah umum, pada segi lain membuka peluang lebih besar bagi spectrum kemunculan lapisan-lapisan kepemimpinan diatas dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam.

c) Output ekonomi

Ini dapat diukur dari tingkat ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai, baik white collar maupun blue collar. Hal ini harus diakui masih merupakan suatu masalah besar yang dihadapi sistem dan lembaga pendidikan Islam. Belum terdapat link and match yang jelas dan kuat antara sistem dan lembaga pendidikan Islam dengan masalah tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai tersebut.

d) Output sosial

Dapat dilihat dari tingkat integrasi sosial dan mobilitas peserta didik ke dalam masyarakat secara keseluruhan. dalam hal ini integrasi sosial output system dan lembaga pendidikan Islam kelihatannya relative berhasil, karena didukung oleh factor kependudukan Indonesia yang mayoritas beragama Islam.¹⁹ Tetapi dalam hal mobilitas sosial, sistem dan kelembagaan pendidikan Islam kelihatannya belum lagi kelihatan signifikansinya.

e) Output Kultural

Tercermin dari upaya-upaya pengembangan kebudayaan ilmiah, rasional dan inovatif; peningkatan peran integrative agama; dan pengembangan bahasa pendidikan. Pada tingkat pendidikan tinggi, sistem dan kelembagaan pendidikan Islam (dalam hal ini, IAIN) sulit diingkari sedikit banyak telah mampu mengembangkan paradigma keIslaman yang lebih integrative, dengan pendekatannya yang non-mazhab. Tetapi pada tingkat lembaga pendidikan yang lebih rendah,

¹⁹ Ibid, hlm. 9

kebudayaan ilmiah, rasional dan inovatif kelihatannya belum banyak berkembang.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut dapat diterapkan dalam agenda perubahan pendidikan Islam dalam konteks Indonesia secara keseluruhan.

3. Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia

Kemunculan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, sebagaimana dikemukakan diatas, berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisasi Islam di kawasan ini. Gagasan modernisasi Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad 20, pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang di adopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Pemrakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi “modernis” Islam seperti Jami,at Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah dan lain-lain.

Pada awal perkembangan adopsi gagasan pembaharuan pendidikan Islam ini setidaknya-tidaknya terdapat kecendrungan pokok dalam eksperimentasi organisasi-organisasi Islam diatas. Pertama adalah adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Titik tolak pembaharuan pendidikan Islam di sini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan modern, bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional.

Eksperimen ini terlihat jelas dilakukan oleh para pembaharu modernis di Sumatra Barat. Pembaharuan pendidikan Islam di Sumatra barat ini juga dibahas secara khusus dan rinci oleh Marwan Saridjo dalam bukunya “Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam”.

Pada pihak lain terdapat eksperimentasi yang bertolak justru dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Di sini pendidikan agama Islam yang sebenarnya telah ada sejak waktu lama dimodernisasi, sistem pendidikan madrasah atau surau, pondok dan pesantren, yang memang secara tradisional merupakan kelembagaan pendidikan Islam indigenous, dimodernisasi misalnya dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pengajaran dan sebagainya.

Upaya menjadikan sistem dan lembaga pendidikan indigenous (dalam hal ini pesantren) sebagai basis dalam pengembangan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam pada masa lebih belakangan (1926) kembali dilakukan di pulau Jawa dengan pembentukan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Gagasan yang berada di belakang pembentukan pondok pesantren modern adalah kesadaran bahwa perlunya pembaharuan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam, tidak dengan mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan modern Belanda, melainkan dengan memodernisasi system dan kelembagaan pendidikan Islam indigenous. Kenapa yang belakangan yang dijadikan alternatif? Saya kira alasannya sederhana, walaupun punya makna filosofis mendalam bahwa pesantren

lebih berakar kuat dan mendalam dan sebab itu, lebih acceptable bagi banyak kaum muslimin.

Kedua bentuk eksperimen ini pada dasarnya terus berlanjut hingga dewasa ini. Dengan demikian kita bisa melihat dua arus utama:

Pertama, sistem dan kelembagaan pendidikan Islam yang sebenarnya merupakan pendidikan umum dengan penekanan yang seadanya pada aspek-aspek pengajaran Islam. Termasuk kedalam kategori ini adalah madrasah pasca UUSPN 1989, yang secara eksplisit, menyatakan bahwa madrasah-madrasah adalah "sekolah umum" yang berciri keagamaan.

Kedua, adalah sistem dan kelembagaan pesantren yang dalam banyak hal telah di modernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Modernisasi pesantren yang menemukan momentumnya sejak akhir 1970-an telah banyak mengubah sistem dan kelembagaan pesantren. Perubahan cukup mendasar misalnya terjadi pada aspek-aspek tertentu dalam kelembagaan. Dalam hal ini, dalam waktu-waktu terakhir banyak pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah sesuai dengan pola Departemen Agama, tetapi juga bahkan mendirikan sekolah-sekolah umum dan universitas umum. Dengan perkembangan ini, apa yang tersisa dari aspek kelembagaan pesantren itu adalah boarding systemnya. Dan boarding system ala pesantren ini ternyata menemukan momentum popularitas baru.

Salah satu masalah pokok, yang hingga sekarang masih menduduki tempat dalam wacana pemikiran Islam pada umumnya adalah hubungan antara Islam dengan modernisme, modernitas dan modernisasi itu sendiri. Memang, pada tingkat doktrin hampir seluruh pemikir Islam modern sepakat bahwa pada dasarnya tidak ada pertentangan antar Islam dengan modernitas. Persoalannya kemudian adalah jika Islam compatible dengan modernitas, sejauh manakah modernisme dan modernisasi bisa ditoleransi? Semua ini sebenarnya persoalan "klasik" yang belum terselesaikan dalam agenda pemikiran Islam sejak awal abad ini hingga masa-masa kontemporer. Dan persoalan ini menjadi berganda ketika dalam beberapa dasawarsa terakhir, mulai berkembang pandangan tentang kegagalan modernitas dan modernisme Barat yang sebagiannya juga diadopsi kaum muslimin, termasuk dalam lapangan pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, modernisme dan modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam berlangsung sejak awal hingga sekarang ini nyaris tanpa melibatkan wacana epistemologis, modernisme dan modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam cenderung diadopsi dan diimplementasikan begitu saja, sedikit sekali perhatian yang diberikan pada wacana epistemologis ini. Kalaupun ada perhatian, pembahasan dan perumusan yang dihasilkan jauh dari pada tuntas. Sebagai implikasinya, modernisme dan modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara adhoc (sementara) dan parsial. Sebab itulah modernisasi yang dilakukan kemudian cenderung bersifat involotif yakni sekedar perubahan-perubahan yang hanya

memunculkan kerumitan-kerumitan baru dari pada terobosan-terobosan yang betul-betul bisa dipertanggung jawabkan, baik dari segi konsep maupun viabilitas, kelestarian dan kontinuitasnya.

B. Memahami Makna Dasar Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Dari segi bahasa pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya.²⁰

Selanjutnya jika kata pendidikan dan Islam disatukan menjadi pendidikan Islam, maka artinya secara sederhana adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam dengan ciri-cirinya. Namun dalam arti lebih luas pendidikan Islam memiliki pengertian yang bermacam-macam. Sebagian ada yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al Quran dan terjabar dalam Sunnah Rasul. Para pakar lainnya berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan pergaulan yang mengandung rasa kemanusiaan terhadap terhadap anak dan mengarahkan kepada kebaikan disertai dengan perasaan cinta kasih kepada dengan menyediakan suasana yang baik dimana bakat dan kemampuan anak dapat tumbuh dan berkembang secara lurus

Secara Keseluruhan definisi yang bertepatan pendidikan Islam itu mengacu kepada suatu pengertian bahwa yang di maksud dengan pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbin suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan ini secara hirarkis bersifat ideal bahkan universal,

Pengertian pendidikan Islam yang dikaitkan dengan konsepsi tentang kejadian manusia yang sejak dari awal kejadiannya sebagai makhluk tuhan yang mempunyai ciri dasar yang dibekali potensi hidayah dan ilmu, disamping pada sisi lain menjalankan misi untuk mengabdikan dalam arti yang luas sebagai kholifah di bumi memikul amanat dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pengertian pendidikan Islam adalah merupakan usaha sadar untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya agar mampu mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai kholifah Allah di bumi.

Pengertian pendidikan Islam yang demikian harus dilakukan terhadap dua hal:

- a. Memperoleh kejelasan tentang pengertian dan konsepsi pendidikan Islam yang secara mendasar harus diletakkan pada kejadian dan misi manusia sebagai kholifah Allah di bumi.

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam jilid 2*, Raja Grafindo Persada, hlm. 285.

- b. Menempatkan kelembagaan pendidikan Islam dengan isi program pendidikannya bukan hanya sempit dalam pengertiannya, akan tetapi juga relevansinya dengan kepentingan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern, tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pembangunan di segala bidang.

Dalam hubungan itu pengertian dan konsepsi pendidikan Islam harus diletakkan dalam konteks sosial kultural yaitu agar dalam penerapannya dilakukan secara luas dan serasi. Oleh karena itu, perlu diadakan pemikiran kembali terhadap tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam agar secara fungsional pada satu sisi mampu mengemban misi manusia sebagai kholifah Allah di bumi dan pada sisi lain menjadi lembaga spesialisasi pada bidangnya yaitu bidang agama. Dengan demikian lembaga pendidikan diadakan adalah dalam rangka pembagian tugas dengan tujuan dan fungsi tertentu yang keduanya dikehendaki adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan.²¹

Bahwa pendidikan Islam adalah semua jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Islam.²² yang memberikan kontribusi paling dominan kepada proses “pembumih” ajaran Islam, baik institusi pendidikan yang secara eksplisit berdiri di atas label pendidikan Islam maupun institusi “pendidikan umum” tetapi secara implisit berdimensi dan atau berciri khas keagamaan.²³

Dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai Islam dalam praktek pendidikan diperlukan suatu institusi yang mempunyai dukungan kuat terhadap kepentingan nilai-nilai agama dan pelibatan banyak pada operasionalisasi nilai-nilai tersebut, maka secara struktural dibentuklah suatu lembaga Pendidikan Tinggi Islam seperti perguruan-perguruan tinggi Islam baik Universitas maupun institusi.

Pendidikan yang telah dilekatkan kepada Islam telah di definisikan secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan, yang banyak dipengaruhi pandangan dunia masing-masing. Namun, pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam semacam kesimpulan awa, bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih dari pada sekedar pengajaran, yang terakhir ini dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.

Perbedaan pendidikan dengan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik disamping transfer ilmu dan keahlian. Dengan semacam proses ini suatu

²¹ Abdurrahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, PT. Gemawindu Pancaperkasa: 2001, hlm. 5.

²² Zainuddin, dkk. *Seluk-beluk Pendidikan*, dari Al-Ghozali, Bumi Aksara, Jakarta : 1991, hlm. 66-67

²³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prospektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung : 1992. hlm. 37.

bangsa atau Negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong kehidupan. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia menyatakan, pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Secara lebih filosofis Muhammad Natsir dalam tulisan “ideologi pendidikan Islam” menyatakan yang dinamakan pendidikan ialah, suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inderanya dalam konotasi istilah “tarbiyah”, “ta’lim”, dan “ta’dib” yang harus difahami secara bersama-sama.

Secara ideal fungsi pendidikan Islam sesungguhnya mempunyai fungsi kultural untuk melestarikan dan mewariskan cita-cita masyarakat yang di dukunginya. Dalam fungsi ideal ini pula sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam juga adalah berfungsi untuk mengontrol dan mengarahkan perkembangan masyarakat.²⁴ Ia tidak saja berusaha untuk mencetak kader bangsa dan kader masyarakat yang berkualitas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperjuangkan nilai – nilai tertentu yang bersifat luhur.

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks sosial masyarakat, bangsa dan Negara, maka pribadi yang bertaqwa ini menjadi *rahmatan lil’alamin*, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam.

Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyimpan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.²⁵

Pengertian tersebut memberikan penekanan pada maksud tertentu sesuai dengan ruang lingkup bidang bahasan dari pendidikan Islam yaitu suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang di wahyukan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad Saw, agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai kholifah di muka bumi, yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan di dunia dan di akhirat.

2. Tujuan Pendidikan Islam

²⁴ Sidi Ghosalba, Masyarakat,....., Op. Cit, hlm. 218

²⁵ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Al-Ma’arif, Bandung : 1980, hlm. 94

Tujuan adalah batas akhir yang dicita-citakan seseorang dan dijadikan pusat perhatiannya untuk dicapai melalui usaha. Dalam tujuan terkandung cita-cita, kehendak, dan kesengajaan serta berkonsekuensi penyusunan daya upaya untuk mencapainya.

Pembahasan tentang tujuan secara mendasar merupakan bidang kajian filsafat khususnya filsafat tentang manusia dan kedudukannya ditengah dunianya dengan segenap harapan dan kebutuhannya, baik yang menyangkut harapan duniawi maupun ukhrowi. Oleh sebab itu, untuk membahas tujuan pendidikan, ilmu pendidikan selalu berkonsultasi kepada filsafat pendidikan, yang meninjau segenap konsepsi pendidikan dalam konteksnya yang lebih tinggi.²⁶

Tujuan pendidikan Islam adalah batas sasaran yang harus dicapai oleh pendidik Islam sebagai suatu unsur yang sangat menentukan sistem pendidikan itu, karena inilah yang merupakan harapan masyarakat akan hasil pendidikan baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif.

Menurut M. Athiyah Al-Abrasyi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan 5 tujuan umum yang asasi bagi pendidikan Islam yaitu :

- a. Untuk pembentukan akhlak yang mulia²⁷
- b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat.
- c. Mempersiapkan segi-segi manfaat.
- d. Mempelajari semata-mata untuk ilmu saja.
- e. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis dan perusahaan agar dapat mencari rizqi.

Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Hery Noer Aly dan Munzier Suparta adalah berhubungan erat dengan agama Islam itu sendiri, lengkap dengan akidah, syari'at dan sistem kehidupannya. Keduanya ibarat dua kendaraan yang berjalan diatas dua jalur seimbang, baik dari segi tujuan maupun rambu-rambunya yang disyari'atkan bagi hamba Allah yang membekali diri dengan taqwa, ilmu, hidayah serta akhlak untuk menempuh perjalanan hidup.²⁸

Tujuan agama Islam adalah memberi kebahagiaan kepada individu di dunia dan diakhirat dengan memerintahkan kepadanya untuk tunduk, bertaqwa, dan beribadah dengan baik kepada Allah. Tujuan ini terlihat antara lain didalam firman Allah SWT sebagai berikut: "dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Q.S. al-Dzariyat, 51:56).

Uraian diatas menunjukkan secara jelas perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan lainnya, baik yang tradisional maupun yang modern. Pendidikan Islam bersifat Robbani (Ketuhanan), sebab mengacu kepada Allah, Robbul Alamin (Tuhan Alam Semesta) dan

²⁶Herry Noer Ali dan HM Suparta, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Amisco, Jakarta; 2003, hlm. 79

²⁷Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan* dari Al-Ghazali, Jakarta, 1991, hlm. 44

²⁸Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*, CV. Triasco, Jakarta: 2003; hlm. 138.

Robbunnas (Tuhan Manusia). Sifat yang demikian membuat pendidikan Islam benar-benar berbeda dari pendidikan lainnya, baik dari segi tujuan, watak, isi, karakteristik, maupun pengaruh praktisnya. Sifat itu pula yang membuat proses pendidikan Islam berjalan di atas jalur yang telah digariskan agama Islam dalam artian yang luas, yaitu sebagai agama bagi kehidupan di dunia dan di akhirat serta agama yang meliputi segala persoalan hidup, berbagai hajat individu, masyarakat dan seluruh umat manusia.²⁹

Sedangkan dalam kajian yang dibuat Abdurrahman An-Nahrawi dalam buku, dasar-dasar pendidikan Islam dan metode pengajarannya. Ada 4 tujuan umum yang ditampilkan yaitu:

- 1) pendidikan akal dan persiapan pikiran
- 2) menentukan potensi-potensi dan bakat-bakat asal pada anak-anak
- 3) menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, baik laki-laki atau perempuan
- 4) berusaha untuk mengembangkan segala kekuatan dan kesediaan manusia.³⁰

Untuk mencapai hal tersebut di atas maka pelaksanaannya dapat ditempuh dengan cara :

- a) Mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia lewat jalur pendidikan sehingga mampu untuk berkreasi dan berkembang
- b) Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran agama dengan baik dan sempurna sehingga mencerminkan sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya.

Dari uraian di atas, maka di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut :

- (1). untuk memahami dan memikirkan kejadian yang ada di langit dan di bumi, supaya kita bergantung pada akal kita untuk sampai pada keimanan yang sempurna.
- (2). Membentuk keluhuran budi pekerti.
- (3). Menjembatani pendidikan fikiran dan pendidikan psikologis anak didik.
- (4). menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis supaya ia dapat menguasai profesi tertentu

Sehubungan dengan pendidikan, banyak disinggung tentang kemuliaan orang yang berilmu dan mereka akan mendapat tempat yang luhur, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat al-mujadalah ayat 11 sebagai berikut : *“Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat”*.³¹

²⁹Ibit, hlm. 141.

³⁰Syad Sajjad Husain dan Syad Ali Asyraf, *Krisis Pendidikan Islam*, Risalah Bandung : 1986. hlm. 54

³¹Proyek Pendanaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI. 1978. hlm. 911

BAGIAN KE III. PEMIKIRAN AZYUMARDI AZRATENTANG PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Pembaharuan Pendidikan Islam

1. Pembaharuan Pendidikan Islam

Adalah benar pendapat para pakar yang mengatakan bahwa, pendidikan merupakan kunci yang sangat penting dan strategis bagi setiap upaya untuk meraih berbagai kemajuan dalam suatu kehidupan masyarakat atau bangsa. Kebenaran paradigma pemikiran dan akurasi pendapat ini pasti berlaku baik untuk masa yang lalu, kini, esok dan bahkan untuk masa-masa yang akan datang. Puncak-puncak kemajuan sains dan teknologi dengan segala totalitas cabang keilmuan yang dicapai oleh suatu masyarakat atau bangsa sudah pasti ditentukan oleh taraf dan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Semakin baik mutu dan bobot kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka semakin baik pula mutu dan bobot kualitas kehidupan bangsa itu. Sebagai bangsa-bangsa yang masih dalam taraf berkembang dan secara umum masih tergolong ke dalam kelompok Negara-negara dunia ketiga, dewasa ini umat Islam di seluruh dunia pada umumnya dan umat Islam Indonesia pada khususnya, menghadapi berbagai kompleksitas tantangan modernitas dan himpitan problem-problem pendidikan yang begitu ruwet dan centang perenang.

Gagasan program modernisasi pendidikan Islam mempunyai akar-akarnya dalam gagasan tentang “modernisme” pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, modernisme pendidikan Islam tidak bisa di pisahkan dengan kebangkitan gagasan dan program modernisme Islam secara keseluruhan bahwa modernisasi pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah di modernisasi, sederhananya harus sesuai dengan kerangka “modernitas”, mempertahankan⁶⁰ pemikiran kelembagaan Islam “tradisional” hanya akan memperpanjang nestapa ketidak berdayaan kaum muslim dalam berhadapan dengan kemajuan dunia modern.

Dalam konteks Indonesia, modernisme dan modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam berlangsung sejak awal abad ini hingga sekarang nyaris tanpa melibatkan wacana epistemologis; modernisme dan modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam cenderung diadopsi dan di implementasikan begitu saja. Karena itu, modernisme dan modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara adhoc (sementara) dan parsial. Sebab itulah,

modernisasi yang dilakukan kemudian cenderung bersifat involutif; yakni sekedar perubahan-perubahan yang hanya memunculkan kerumitan-kerumitan baru dari pada terobosan-terobosan yang betul-betul bisa di pertanggung jawabkan, baik dari segi konsep maupun viabilitas, kelestarian dan kontinuitasnya.

Secara teoritis dan empiris, pendidikan merupakan alat yang sangat fungsional dalam upaya pembentukan manusia yang berkualitas, yang mampu mandiri dan memberikan dukungan bagi perkembangan masyarakat dan berpengaruh dalam peningkatan mutu kehidupan dan mengangkat martabat bangsa.

Melalui pendidikan di harapkan seseorang dapat meningkatkan kualitas pikir, kualitas moral, kualitas pengabdianya. Globalisasi umumnya di asumsikan sebagai kondisi dimana dunia menjadi lebih saling terikat satu sama lain, saling mempengaruhi, saling independen dan kesemuanya itu di jalin oleh kecanggihan informasi.

Di dalam buku pendidikan Islam tradisi dan modernisasi menujumenium baru, Azyumardi Azra mengemukakan gagasannya tentang modernisasi pendidikan Islam yang di hubungkan dengan tantangan abad ke-21 dan era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berdasar pada pendekatan sejarah sebagai bidang keahliannya, Azyumardi Azra mengajukan saran-saran upaya modernisasi pendidikan Islam tersebut antara lain:

- a. Melalui pengembangan kajian Islam sebagai disiplin keilmuan Universitas.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Pembentukan sekolah - sekolah yang unggul

Dalam hubungan ini ia mengatakan: "Jika kaum muslimin, termasuk Indonesia tidak hanya ingin sekedar survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap mampu tampil kedepan, maka reorientasi) pemikiran mengenai pendidikan Islam dan restrukturisasi sistem dan kelembagaan jelas merupakan keniscayaan.

Cara pandang yang menganaktirikan iptek tampak tidak bisa dipertahankan lagi.³² Namun demikian, modernisasi pendidikan Islam yang di gagas oleh Azyumardi Azra adalah modernisasi yang di dasarkan pada ajaran Islam yang pada prinsipnya sangat modern.

Untuk itu ia mengatakan pengalaman ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, manusia merupakan karakteristik pendidikan Islam berikutnya. Disini suatu pengetahuan bukan hanya untuk diketahui dan di kembangkannya, melainkan sekaligus di praktekkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, terdapat Konsistensi antara apa-apa yang di ketahui dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya di dalam Islam mengetahui sesuatu

³² Lihat Azyumardy Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Mellenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. 1, hlm. XVII.

ilmu pengetahuan sama pentingnya dengan pengalamannya secara konkret.³³

Hal tersebut memperlihatkan bahwa, bagi Azyumardi Azra, gagasan modernisasi pendidikan Islam sebagaimana tersebut diatas hendaknya tidak hanya menjadi wacana, melainkan harus menjadikenyataan dan di praktikkan. Praktik tersebut telah terlihat dalam berbagai upaya pembaruan yang dilakukannya pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hingga saat ini kondisi Perguruan Tinggi Islam yang berada di bawah naungan Departemen Agama semacam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) belum seluruhnya dipandang sebagai sejajar dengan Perguruan Tinggi Umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Lulusan Perguruan Tinggi Islam masih memilih keterbatasan peluang dalam memasuki lapangan kerja yang disebabkan karena keahlian yang dimilikinya, yakni hanya ilmu agama Islam.

Prof. Dr. Azyumardi Azra melalui Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah berhasil mengubah citra Perguruan Tinggi Islam sebagai Perguruan Tinggi yang sejajar dengan Perguruan Tinggi yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Bahkan kini UIN yang dipimpinya menjadi Universitas Islam terbaik di Asia Tenggara.

Dalam konteks ini kita dapat mengatakan bahwa Azyumardi Azra bukan hanya sebagai seorang pemikir teoritis tentang pendidikan Islam. Tampaknya bagi Azyumardi bahwa ide dan kenyataan harus di bangun bersama-sama, karena dengan cara demikianlah sebuah ide dapat disalurkan manfaatnya. Dengan mengambil contoh yang sederhana, kelihatannya ia ingin antara jiwa dan raga, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, ilmu dan agama, dan berbagai keseimbangan lainnya sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam menjadi sebuah realitas yang dirasakan manfaatnya.

2. Pembaharuan pendidikan pesantren Dan Surau

Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, pesantren pada mulanya merupakan pusat pengemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertikal (dengan penjejalan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran social). Pesantren kini tidak lagi tidak berkuat pada kurikulum yang berbasis keagamaan dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh kekinian masyarakat.³⁴

Mengapa pesantren bisa survive sampai hari ini? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya mengada-ada. Tetapi terus terang, pertanyaan ini sering menggoda kita, dan mungkin juga banyak pengamat pendidikan

³³ Ibit, hlm. 10

³⁴ Mastuki dan M. Ishom El Saha, *Intelektualisme Pesantren Seri III*, Diva Pustaka, Jakarta; 2003. hlm. 1

Islam Indonesia lainnya. Sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan dunia muslim, tidak banyak lembaga-lembaga tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Kebanyakannya lenyap setelah tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan umum, untuk tidak menyebut sistem pendidikan sekuler atau mengalami transformasi menjadi pendidikan umum atau setidaknya tidaknya menyesuaikan diri dan mengadopsi sedikit banyak isi dan metodologi pendidikan umum.

Surau sebagai lembaga pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan pesantren di Jawa. Dalam konteks ini surau lebih dari sekedar langgar atau musholla. Tentu saja sejak masa awal penyebaran Islam di Minangkabau terdapat surau yang merupakan awal sekedar tempat belajar, dan pengetahuan dasar tentang Islam. Surau seperti ini sekaligus menjadi tempat sosialisasi, adat istiadat, belajar silat, dan lain-lain.

Tetapi penting untuk dikemukakan, secara historis surau sebagai lembaga pendidikan Islam yang lengkap merupakan kompleks bangunan yang terdiri dari masjid, bangunan-bangunan untuk tempat belajar, dan surau-suru kecil yang sekaligus menjadi pemondokan murid-murid yang belajar di surau.

Prototype surau seperti ini adalah surau ulakan yang didirikan oleh Syaikh Burhanuddin (1646-1691). Selanjutnya surau-suru seperti ini berkembang ke wilayah Darek. Seperti Surau Koto Tuo (Tuanku Nan Tuo) Agama yang memiliki distingsi dalam bidang tafsir, Surau kotogadang yang terkenal sebagai pusat ilmu Mantiq dan Ma'ani, Surau Sumanik, tersohor kuat dalam ilmu-ilmu bahasa Arab Surau Talang, dan Surau Salayo, yang keduanya terkenal dalam bidang Nahwu-Shorof, keseluruhan surau ini mencapai puncak kejayaannya dalam masa pra-Paderi.

Gerakan pemurnian radikal paderi menghancurkan banyak surau dalam masa pasca perang paderi, hanya beberapa surau besar saja yang mampu bertahan, diantaranya adalah surau Batu Ampar yang didirikan Syaikh Abdurrahman (1777-1888), kakak Bung Hatta. Dan pada masa Pasca-kemerdekaan surau Candung dan surau Parabek.

Jelas bahwa kemunduran surau disebabkan oleh gelombang-gelombang pembaharuan keagamaan dan pendidikan umum. Gelombang pemurnian Islam yang di lancarkan Paderi dan kemunculan modernisasi Islam Salafi pada awal abad ke-2 memunculkan corak Islam yang tidak konfertebel dengan tradisi dan sistem nilai surau sementara gelombang pendidikan umum (Belanda) yang menemukan momentumnya sejak perempatan terakhir abad ke-19 menyeret anak-anak muda menjauh dari pendidikan surau.

“Apakah tradisi dan sistem nilai surau itu?” tradisi ini sebagian besarnya mirip dengan tradisi dan sistem nilai pesantren di Jawa. Tradisi itu pada dasarnya bertumpu pada pandangan dunia, ideologi keagamaan dan praktek keIslaman yang lazimnya disebut sebagai “Islam tradisi atau Islam tradisional” secara lebih spesifik, semua ini lebih diaktualisasikan dengan kepenganutan kepada Kalam Asy’ari, Fikih Syafi’i, dan Tasawwuf

Al-Ghozali, yang terakhir ini diperkuat dengan tarekat-tarekat yang pada gilirannya mewarnai distingsi surau.³⁵

Sistem nilai dan tradisi surau yang mirip jika tidak sama dengan sistem nilai dan tradisi pesantren, tidak kompatibel dengan realitas historis dan sosiologis masyarakat Minangkabau. Pertama, masyarakat Minang adalah masyarakat yang terbuka dan responsif kepada pembaharuan dan “alam kemajuan” karena itu, ketika gelombang pembaharuan atau tepatnya pemurnian Islam, baik yang diwakili gerakan Paderi maupun kaum muda pada awal abad ke 20, maka surau menjadi sasaran dan target pembaharuan.

Karena surau di pandang memegang paham dan praktek keagamaan yang tradisional, yang penuh dengan bid'ah, khurafat dan takhayul. Begitu juga, ketika sekolah-sekolah Belanda (Wolk Scholen) diperkenalkan pada perempatan terakhir abad ke-19 dengan cepat masyarakat Minang meresponi, karena inilah lembaga pendidikan yang dapat mengantarkan mereka ke alam kemajuan.

Secara fisik pesantren mengalami kemajuan yang cukup fenomenal. Berkat peningkatan kemajuan ekonomi ummat Islam, sekarang ini tidak sulit mencari pesantren yang memiliki gedung-gedung dan fasilitas-fasilitas lainnya yang cukup megah dan mentereng. Pesantren dengan demikian, tidak lagi bisa sepenuhnya diasosiasikan dengan fasilitas fisik seadanya, dengan asrama yang penuh sesak dan tidak higienis misalnya.

Dunia pesantren, dengan meminjam kerangka Husaein Nasr, adalah dunia tradisional Islam, yakni dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama' dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam, seperti misalnya, periode kaum salaf, yakni yakni para sahabat Nabi Muhammad dan tabi'in senior. Anehnya, istilah “salaf” juga digunakan oleh kalangan pesantren misalnya “pesantren salafiyah” walaupun dengan pengertian yang jauh berbeda, jika tidak bertolak belakang dengan pengertian umum mengenai salaf seperti baru saja dikemukakan. Istilah salaf bagi kalangan pesantren mengacu kepada pengertian “pesantren tradisional” yang justru sarat dengan pandangan dunia dan praktek Islam sebagai warisan sejarah khususnya dalam bidang syariat dan tasawwuf.

Karena itu, tetap bertahannya pesantren agaknya secara implicit mengisyaratkan bahwa dunia Islam tradisi dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan ditengah deru modernisasi, meskipun, sebagaimana dikemukakan diatas, bukan tanpa kompromi. Pada awalnya, dunia pesantren terlihat “enggan” dan “rikuh” dalam menerima modernisasi, sehingga tercipta apa yang disebut dengan kesenjangan antara pesantren dengan dunia luar. Tetapi secara gradual pesantren kemudian melakukan akomodasi dan konsensi tertentu untuk kemudian menemukan pola yang

³⁵ Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dan Modernisasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003) hlm.147.

dipandanginya cukup tepat guna menghadapi modernisasi dan perubahan yang cepat dan berdampak luas. Tetapi, semua akomodasi dan penyesuaian itu dilakukan pesantren tanpa mengorbankan esensi dan hal-hal dasarnya lainnya dalam eksistensi pesantren.

Watak sosiologis dan perkembangan historis ini membuat posisi sosial surau semakin lemah dan merosot dari waktu ke waktu, meski kalangan surau berusaha mengkonsolidasikan diri dengan membentuk seperti misalnya perubahan-perubahan sosiologis dan kultural yang berlangsung dalam masyarakat Minang membuat surau tidak pernah lagi bisa bangkit. Perubahan-perubahan sosiologis dan kultural itu nampaknya sudah irreversible, tidak bisa di mundurkan lagi. Karena itu, jika surau ingin di bangkitkan kembali, maka alternatif yang paling mungkin adalah mengembangkan surau dalam kerangka realitas sosiologis dan kultural masa kini, adopsi, “pesantren” dalam masyarakat Minang sekarang agaknya merupakan pencerminan dari bentuk respon yang dipilih.³⁶

Namun penting dicatat, pesantren juga mengalami perubahan yang sangat signifikan karena berlangsungnya modernisasi pesantren di Jawa sejak masa awal Orde Baru. Dalam perubahan-perubahan itu, pesantren kini memiliki empat pilihan jenis pendidikan.

Pertama, pendidikan yang berkonsentrasi pada tafaqquh fi Al-Din.

Kedua, pendidikan berbasis madrasah.

Ketiga, Pendidikan berbasis sekolah umum, dan

keempat, pendidikan berbasis keterampilan.

Keempat pilihan ini memang tidak harus dipertentangkan. Karena pilihan-pilihan ini dapat di kombinasikan.

Tetapi berbagai perubahan baik dalam jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan dan terdapatnya harapan-harapan social yang beragam, menimbulkan kekhawatiran yang cukup intens di kalangan pesantren tentang identitas dan jati diri lembaga ini. Kekhawatiran itu khususnya Menyangkut tiga pokok fungsi utama pesantren secara konvensional.

Pertama, transmisi dan transfer ilmu pengetahuan Islam.

kedua, pemeliharaan tradisi Islam, dan

ketiga, penciptaan kader-kader ulama’, kemunculan pesantren-pesantren di Sumatera Barat dalam dua dasawarsa terakhir dapat dikatakan merupakan pencerminan dari kekhawatiran itu, sementara pada waktu yang sama juga di tuntutan memenuhi harapan-harapan sosial lainnya, jika pesantren di Sumatera Barat tidak hanya dapat bertahan, tapi juga berkembang biak.

Tetapi di balik keprihatinan tadi masih ada harapan meski agaknya dari surau tetapi di balik potret keprihatinan tadi, masih ada harapan, meski agaknya bergeser dari surau. Kemerosotan dan disfungsi surau yang telah menimbulkan keprihatinan mendalam, harus diakui telah menjadi stimulan kuat bagi mereka yang peduli untuk mencari dan mewujudkan eksprimen-eksprimen baru, khususnya dengan mengadopsi kelembagaan. Jika tidak sistem, tradisi dan sub kultur Pesantren.

³⁶ Ibit, hlm. 148.

Memang sulit mengetahui waktu yang pasti kapan adopsi dan penggunaan istilah Pesantren mulai meluas di Sumatera Barat. Bisa dipastikan, penggunaan istilah Pesantren yang sebenarnya secara histories lebih merupakan tradisi Jawa, bukan karena latak mengikuti hegemoni budaya Jawa masa orde baru. Tetapi didasari kesadaran tentang stigma negatif yang sudah terlanjur di lekatkan banyak warga Minang sendiri terhadap surau, Apalagi seperti dikemukakan di atas, istilah surau sebagai momen kultur telah terlanjur lenyap dalam wacana dan kelembagaan pendidikan.

Hemat saya, adopsi kelembagaan Pesantren di Sumatera Barat mulai terjadi ketika modernisasi kian mendapatkan momentumnya sejak 1970 an, sementara surau sebagai lembaga Pendidikan semakin terpinggir. Hasilnya, sekali lagi, momentum surau sebagai Lembaga Pendidikan Islammenghilang, bahkan di Sumatera Barat sendiri, sementara istilah “Pesantren” populer dan kian banyak didirikan menurut data terakhir dari Departemen Agama (2002), kini di Sumatera Barat terdapat 39 Pondok Pesantren dan 10 diantaranya juga menyelenggarakan Pendidikan Formal, baik Madrasah atau Sekolah Umum.³⁷

Salah satu eksperimen yang menonjol dalam adopsi Pesantren di Sumatera Barat adalah Pesantren Modern Prof Dr. Hamka di Pasar Usang. Selatan 20 kilometer, dari kota Padang beberapa tahun lalu. Pesantren Modern Buya Hamka ternyata merupakan eksperimen yang sangat sukses. Pesantren ini bukan hanya dapat memberikan Pendidikan agama kepada para santrinya, tetapi bahkan juga mampu menjadikan dirinya sebagai Lembaga Pendidikan Unggulan, termasuk dalam bidang-bidang umum sekalipun NEM Santri Ibtidaiyah dan Tsanawiyahnya menduduki ranking salah satu yang terbaik, jika tidak yang terbaik di Sumatera Barat.

Meski sangat sukses, jelas pesantren (Buya Hamka atau semacamnya) tidak bisa menggantikan peran dan fungsi surau keagamaan Minang lebih dari pada sekedar Institut Pendidikan Keagamaan. Ia sekaligus merupakan Institusi adat dan budaya. Namun, setidaknya dari sudut Pendidikan keIslaman, dan sekaligus reproduksi Ulama’, cerita keberhasilan Pesantren Modern Buya Hamka hemat saya bisa direduklisasikan di tempat-tempat lain di Minang.³⁸

Pada pihak lain, peran surau agaknya bisa direvitalisasi untuk menjadi sekedar semacam langgar atau musholla, menjadi Institusi awal dan dasar bagi anak-anak Minang setidak-tidaknya untuk belajar mengaji. Jika masih mungkin, surau seperti ini bisa juga sekaligus direvitalisasi untuk sosialisasi nilai-nilai adat, budaya dan tradisi keminangan.

Karena modernisasi dan urbanisasi, surau agaknya memang tidak lagi menjadi “Kamar” bagi anak-anak laki, atau menjadi tempat diam bagi laki-laki tua yang di tinggal wafat oleh istrinya. Agaknya juga tidak lagi menjadi tempat bermalam bagi laki-laki pedagang “Babelok”. Tetapi

³⁷ Ibit, hlm. 149

³⁸ Ibit, hlm. 150

setidak-tidaknya surau masih bisa secara efektif dimanfaatkan untuk kepentingan transmisi nilai-nilai dasar keagamaan dan adat istiadat Minang yang konon.³⁹

3. Pembaharuan IAIN

Diantara berbagai kebijakan yang diambilnya selama ia menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gagasan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terjadinya, perubahan IAIN menjadi UIN tersebut dilakukan oleh serangkaian kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh para pejabat UIN setahap demi setahap.

Dalam kaitan ini paling kurang ada beberapa tahap yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut.

Kedua, tahap perintisan dan penjagaan yang dilakukan dizaman Prof. Dr. Harun Nasution sebagai Rektor. Sebagai seorang yang berpikiran modern dan nasional, Harun Nasution melihat bahwa IAIN yang ada sekarang sudah tidak cocok lagi dengan kebutuhan zaman. Sejak berdirinya IAIN sebagai ADIA di tahun 1957 hingga tahun 1980-an sudah banyak perubahan yang terjadi baik dalam bidang sosial.⁴⁰ Ekonomi, politik, kebudayaan kemajuan ilmu pengetahuan, pola kerja dan lain-lain.

Perubahan tersebut menuntut adanya manusia-manusia yang berbeda dengan manusia-manusia pada masyarakat agraris. Sekarang kita hidup di era industrialisasi yang serba modern. Era ini membutuhkan manusia selain memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, juga harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan dan berwawasan modern seperti inovatif, kreatif, progresif, demokratis, ulet, kerja keras menghargai waktu, berpandangan jauh ke depan dan dinamis. Dalam struktur social kebudayaan, pendidikan Islam paling tidak mengandung empat unsure yang kemudian dijadikan sebagai unsure kebudayaan suatu bangsa, yaitu; 1. Unsur etika (moral) untuk membentuk ikatan-ikatan social. 2. Unsur estetika untuk membentuk cita rasa umum. 3. Logika terapan untuk menentukan bentuk-bentuk aktifitas umum. 4. Teknologi terapan yang sesuai dengan semua jenis yang ada dalam ragam masyarakat atau industri.

Jika IAIN ingin tetap eksis dan dibutuhkan zaman, maka ia harus mengadakan penyesuaian dengan merubah menjadi Universitas. Untuk lebih mematangkan gagasan ini, di zaman Harun Nasution dilakukan serangkaian penelitian, seminar, studi banding ke berbagai negara untuk mendapat masukan yang diperlukan.

³⁹ Ibit, hlm. 151

⁴⁰ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta: 2005. hlm. 398

Ketiga, Tahap lanjutan dan pematangan konsep. Tahap ini terjadi pada zaman Prof. Dr. H.M. Quroish Syihab sebagai Rektor. Setelah Harun Nasution tidak menjabat sebagai Rektor. Gagasan untuk melakukan perubahan IAIN menjadi UIN mengalami masa kevakuman beberapa saat. Di zaman H.M. Quroish Shihab upaya melakukan perubahan IAIN menjadi UIN tersebut dilanjutkan kembali, upaya ini dilakukan dengan cara menyusun proposal perubahan IAIN menjadi UIN yang lengkap dan komprehensif di bawah koordinasi Prof Dr. Azyumardi Azra, M.A. sebagai pembantu Rektor bidang Akademik.

Di dalam proposal tersebut dikemukakan alasan-alasan yang mendasari perubahan tersebut secara lebih lengkap dan meyakinkan. Penambahan Fakultas serta berbagai perangkat dan sarana prasarana yang dibutuhkan, Diantara alasan yang mendasari perubahan IAIN menjadi UIN adalah:

- a. Untuk memberi peluang mendapatkan pendidikan tinggi yang lebih luas kepada para tamatan Madrasah.
- b. Agar tamatan UIN dapat memasuki dunia lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini terjadi karena, dengan dibukanya Fakultas-fakultas umum disamping Fakultas-fakultas agama yang telah ada maka tamatan UIN tidak hanya dapat bekerja di Lembaga Keagamaan, melainkan juga dapat bekerja di sektor lebih luas.⁴¹
- c. Agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menampung tamatanbercorak keagamaan.
- d. Untuk meningkatkan martabat Perguruan Tinggi Islam yang berada dibawah Departemen Agama sehingga sejajar dengan martabatPerguruan Tinggi Umum yang berada dibawah naungan Depdiknas, dan jika dimungkinkan lebih tinggi lagi martabatnya.

keempat, tahap pematangan gagasan dan implementasi,tahap initerjadi pada zaman Prof Dr. Azyumardi Azra, M.A. sebagai Rektor. Pada tahap ini proposal yang memuat gagasan dan pemikiran perubahan IAIN menjadi UIN yang telah dibuat dizaman sebelumnya disempurnakan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.⁴² Melalui tim penyusun proposal yangsolid dan bekerja keras. Akhirnya proposal tersebut dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Proposal tersebut kemudian dipresentasikan dihadapan rapat senat lengkap untukmemperoleh masukan guna penyempurnaan.

Selanjutnya proposal tersebut disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional setelah mengkoordinasikannya dengan menteri agama,khususnya dengan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam (Bagais) Departemen Agama RI sambil menunggu keluarnya keputusan perubahan tersebut. Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. selaku rektor memperkenalkan konsep IAIN dengan mandat yang lebih luas. Dengan mandat ini, maka disamping menyelenggarakan program studi agama

⁴¹ Ibit, hlm. 401.

⁴² Di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 tahun 1999 ditetapkannya Tentang Syarat-syarat dan Prosedur Berdirinya Sebuah Universitas.

seperti yang telah ada sebelumnya, IAIN juga menyelenggarakan program studi umum, seperti program studi:

Agrobisnis, Teknik Informatika, Manajemen Akuntansi, Ekonomi dan lain sebagainya.⁴³

Kelima, pengembangan fakultas dan program studi sering dengan perubahan IAIN menjadi UIN, maka terjadi pula pengembangan pada fakultas-fakultas dan program studi tersebut terjadi bukan hanya pada penambahan fakultas program studi umum, melainkan juga pada penambahan pada program studi agama pada fakultas agama yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, seluruh fakultas dan program studi tersebut secara hukum telah sah dan memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan aktifitasnya.

Keenam, pengembangan sarana dan prasarana sejalandenganadanya perubahan dan pengembangan fakultas dan program studi sebagaimana tersebut di atas, juga terjadi pengembangan pada sarana dan prasarana di zaman Azyumardi Azra, 950% gedung-gedung lama dipugar dan diganti dengan gedung yang baru, gedung tersebut juga di lengkapi dengan jalan melingkar yang memudahkan melakukan interaksi dengan unit-unit yang ada, penataan yang tertib, serta taman-taman yang dilengkapi dengan pohon pelindung dan pohon hias yang tertata rapi dan indah.

Ketujuh, perubahan dan pengembangan pusat-pusat studi dan kerjasama, kebijakan pengembangan pusat-pusat studi tersebut didasarkan pada pemikiran tentang perlunya menciptakan strategi yang tepat untuk memberdayakan dan menciptakan kesejahteraan bagi Civitas Akademika.

Kedelapan, Peningkatan kesejahteraan Dosen dan karyawan dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan dan belanja pegawai yang bersumber dari berbagai sektor yang memungkinkan. Baik dari pemerintah maupun non pemerintah, termasuk dari masyarakat dan usaha sendiri.

Dengan berbagai upaya tersebut, maka tingkat kesejahteraan dosen dan karyawan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan dimana sebagian besar dari dosen dan karyawan telah memiliki rumah dan kendaraan sendiri, dapat menyekolahkan anak-anaknya, dapat memenuhi kebutuhan : sandang, pangan, kesehatan dan sebagainya.

Upaya-upaya nyata yang telah dilakukan Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. tersebut didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berwibawa, yang pada gilirannya dapat menjadi kebanggaan umat Islam.

Harapan terhadap IAIN sebenarnya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, harapan yang bersifat sosial. Kedua, harapan yang bersifat akademik. Setelah berlangsung lebih dari lima dekade, dengan

⁴³ Pada saat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan konsep IAIN dengan mandat yang lebih luas telah dibuka 12 program studi umum yang seluruhnya telah mendapat izin operasional dari Dirjen Pendidikan Tinggi Diklat dan Dirjen Bagaik Depag.

berbagai perubahan baik pada tingkat nasional maupun global, tampak bahwa harapan yang bersifat sosial itu lebih kuat dibandingkan dengan harapan yang bersifat akademik padahal keduanya merupakan satu kesatuan yang ingin diwujudkan oleh IAIN.

IAIN sendiri sejauh yang dapat dilihat masih kuat berpegang teguh pada upaya memenuhi harapan-harapan yang bersifat sosial. Hal ini antara lain terbukti dengan model kajian keIslaman yang sebagian besar masih bersifat normatif, praktek ibadah dan praktikum membaca Al-Qur'an masih menjadi kewajiban setiap mahasiswa IAIN.

4. Pengembangan Intelektual Muslim

Cukup banyak pengertian intelektual yang dikemukakan para ahli, pengertian-pengertian itu seringkali satu sama lain berbeda beda. Sehingga sulit merumuskan satu pengertian tunggal. Pengertian sederhana tentang intelektual misalnya, dikemukakan George A. Theodorson dan Achilles G. Theodorson.⁴⁴ Menurut keduanya, kaum intelektual adalah anggota-anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya pada pengembangan ide-ide orisinal dan terikat dalam pencarian pemikiran-pemikiran kreatif. Sebagaimana di konstataasi Lewis, pengertian ini mengandung konotasi, bahwa kaum intelektual menjadi orang-orang yang tidak pernah puas menerima kenyataan apa adanya. Mereka senantiasa mempertanyakan kebenaran yang lebih tinggi dan luas.

Dengan demikian, terdapat beberap karakteristik dasar yang membedakan kaum intelektual dengan anggota masyarakat lainnya. Karakteristik itu terutama terletak pada penggunaan intelektual, akal pikiran bukan untuk hal-hal yang bersifat praktis, tetapi lebih berorientasi pada pengembangan ide-ide pengembangan mana muncul dalam bentuk sikap skeptis, mempertanyakan nilai-nilai dan pikiran yang sudah established (mapan) untuk menemukan ide-ide kebenaran-kebenaran baru.

Hal itulah yang kemudian memperkuat Jurnal tentang kaum intelektual yang menyatakan bahwa, mereka pada dasarnya bersifat progresif revolusioner, meskipun lebih diwujudkan dalam revolusi pemikiran bukan revolusi fisik. Pengimbasan dari sifat itu pulalah yang muncul dalam perilaku kritis, dan sebagai kritikus dalam masyarakat, kaum intelektual sesuai dengan kualitas menyatakan pikiran dan kritiknya sayogyanya secara jelas dan bijak, seperti pendapat Niebuhr, kaum intelektual sebagai mereka yang mampu menyatakan perasaan dan pikirannya dalam ucapan yang jelas dan bijak.⁴⁵

Singkat kata, kaum intelektual mampu berpikir bebas dalam artian mencakup pengamatan yang cermat terhadap gejala-gejala di suatu lingkungan, pemahaman tentang sebab-sebab gejala itu dan korelasinya dengan gejala lain, perumusan dan proses pemikiran itu kemudian

⁴⁴ George A. Theodorson dan Achilles G. Theodorson, *A. Modern Dictionary Of Sociology*, Barnes and Noble Books, New York, 1979.

⁴⁵ Reinhold Niebuhr : A Controversial portrait, di kutip Mochtar pabot tingi, prisma, 6 juni 1982, hlm. 41.

hendaknya di komunikasikannya dalam suatu kesimpulan yang bersikap umum dan jelas.

Sebaliknya, sebagian besar jebolan pendidikan formal tidak dapat dimasukkan ke dalam, golongan intelektual. Mereka lebih tepat disebut kaum intelegensia atau orang-orang terdidik. Hal ini karena sebagai produk perguruan tinggi mereka telah menerima pendidikan yang membuat mereka mampu memegang pekerjaan sesuai dengan bidang dan profesi ilmunya. Intelegensia seperti di tulis Gouldner, adalah mereka yang minat intelektualnya secara fondamental bersifat teknis.

Di samping itu, banyak pula tamatan perguruan tinggi mengalami kemandegan atau kehilangan kapasitas intelektualnya seketika mereka kedalam birokrasi dan rutinitas akademis di perguruan tinggi atau dimanapun mereka bekerja. Produk perguruan tinggi yang diharapkan menjadi Avant Garde, Innovator atau pembaharu. Masyarakat kemudian terjebak dalam mekanisme birokrasi dan spesialisasi atau profesinya dimana mereka ini terus menerus mengolah dan menghasilkan informasi dan pikiran dalam bidang mereka masing-masing yang sangat sempit.

Padahal masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dewasa ini tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan sempit semacam itu, pemecahan masalah sekarang ini membutuhkan pendekatan menyeluruh, pinter, disipliner, dan berwawasan luas.

Kehadiran IAIN, tidak terlepas dan cita-cita umat Islam Indonesia untuk memajukan ajaran-ajaran Islam di Indonesia.⁴⁶ Setelah mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, umat Islam Indonesia mengalami keterbelakangan dan disintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbentukan umat Islam Indonesia dengan pendidikan dan kemajuan baru memunculkan kaum “Intelektual baru” yang sering juga disebut “Cendikiawan Sekolah”.⁴⁷ Kaum Intelektual baru ini menurut Bendo, sebagian besar adalah hasil pendidikan Barat yang terlatih berpikir secara Barat. Hal ini, menurut Janson, terjadi karena dalam proses pendidikan mengalami brain Washing (cuci otak) dari hal-hal yang berbau Islam. Akibatnya, mereka menjadi terasing dan teralienasi dan ajaran-ajaran Islam dan masyarakat muslim sendiri.

Kehadiran kaum intelektual sekuler atau intelektual baru ini menimbulkan masalah lebih lanjut, yakni terciptanya gap antara kaum intelektual baru pada satu pihak dengan kaum intelektual lama (ulama) pada pihak lain. Kaum intelektual baru hasil pendidikan Barat cenderung terpisah dari kaum intelektual lama (ulama). Bahkan yang terakhir ini sering dikonotasikan sebagai kaum sarungan yang hanya tahu soal-soal keagamaan tapi buta dalam masalah-masalah keduniaan. Implikasi selanjutnya adalah terjadinya penyempitan pengertian ulama' sebagai mereka yang hanya mengerti soal-soal keagamaan belaka. Sering mereka tidak dimasukkan ke dalam barisan kaum intelektual.

⁴⁶ Team Penyusun, Buku Pedoman IAIN Syarif Hidayatullah, IAIN Jakarta, 1976, hlm. 1.

⁴⁷ Berita Antropologi, Yaperma, Jakarta, 26-4-1976, hlm. 11.

Karena itulah kemudian muncul gagasan di kalangan umah Islam Indonesia untuk menciptakan ulama' intelektual dan intelektual ulama' atau dengan kata lain, agar ulama' intelektual atau intelektual ulama' dapat dijumpai pada diri seseorang.⁴⁸

Sementara itu pengetahuan dan penghayatan Islam di kalangan masyarakat Islam pada umumnya belum pula menggembirakan. Konflik dan pertentangan sangat mudah terjadi hanya karena masalah-masalah khilafiah yang kecil. Meskipun pengetahuan tentang Islam hadir berbarengan dengan masuknya agama ini ke tanah air. Tetapi perkembangannya sangat ketinggalan di dibandingkan dengan Pengetahuan lain.

Perubahan sosial yang begitu cepat seolah-olah tidak dapat direspon agama, karena dalam pengembangan pengetahuan agama itu sendiri lebih banyak dilakukan pendekatan doktriner, normatif dan logistik. Hal ini sebenarnya tidaklah salah, tetapi bila usaha pengembangan sewajarnya tidak dilakukan maka ia dapat mengakibatkan terciptanya krisis kesetiaan kepada agama, karena agama dipandang tidak mampu meresponi realitas sosial yang selalu berubah.

Semua kenyataan di atas menjadi bahan pertimbangan mendirikan IAIN. Dalam tujuan IAIN, hal ini dapat disimak bahwa antara lain IAIN dimaksudkan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat.⁴⁹ Selanjutnya dalam pasal 2 peraturan Presiden No.11 tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN ditegaskan, Institut agama Islam Negeri bermaksud untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam Ilmu Pengetahuan tentang agama Islam.

Dengan mempertinggi taraf pendidikan dalam lapangan agama dan ilmu pengetahuan Islam adalah berarti mempertinggi taraf kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian (Spiritual) dan ataupun dalam taraf intelektualnya.⁵⁰

Dengan landasan tersebut IAIN diharapkan mampu memberikan dan jawaban Islam terhadap tantangan-tantangan zaman. Ia hendaklah dapat memberikan warna dan pengaruh keislaman kepada masyarakat Islam secara keseluruhannya. Semua ini dapat disebut sebagai ekspektasi sosial kepada IAIN. Dengan demikian, IAIN memikul dua harapan yaitu Social Expectation dan academic Expectation.

Dalam kerangka kedua ekspektasi itu, umat Islam mengharapkan lahirnya para pemikir dan pemimpin-pemimpin Islam atau para ulama terkemuka dari IAIN. Untuk itu, sebagai tempat menghasilkan para pemikir Islam, ia harus menciptakan iklim yang kondusif dimana.

⁴⁸ Delia Noer, Masalah Ulama Intelektual Agama, bulan bintang, Jakarta. 1974, hlm. 8.

⁴⁹ Delar Noer, Masalah Ulama' Intelektual atau Intelektual Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 8

⁵⁰ H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pembina pendidikan Agama, Depag, RI. Jakarta, 1982. hlm. 106.

terdapat suasana yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ide-ide segar berkenaan dengan pengalaman dan aktualisasi ajaran-ajaran Islam dalam abad modern ini. Dan sebagai wadah pembinaan calon para pemimpin dan ulama Islam IAIN dituntut pula memberikan bekal-bekal kepemimpinan dan intelektualitas yang teruji dengan integrasi pribadi dan akhlak yang tinggi sehingga dapat diteladani masyarakat lainnya.

B. Analisis Terhadap Pemikiran Azyumardy Azra Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam

1. Pembaharuan Pendidikan Islam

Salah satu masalah besar yang di hadapi bangsa Indonesia (dan juga bangsa-bangsa lain) ialah yang berkaitan dengan proses perubahan (transformasi) dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan informasi, yang di tandai oleh berbagai perubahan fisik, pranasosial serta pergeseran sistem nilai. Perubahan ini disertai juga benturan antara nilai-nilai tradisional yang melekat pada budaya agraris dengan nilai-nilai budaya industri dan budaya informasi.

Di era globalisasi dewasa ini dan dimasa datang tidak hanya menampilkan tantangan-tantangan yang bersifat internal saja. Melainkan tantangan yang bersifat eksternal global. Maka diantara “keunggulan-keunggulan” yang mutlak dimiliki bangsa. dan negara Indonesia adalah penguasaan atas sains-teknologi dan keunggulan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sesuai dengan cirinya sebagai pendidikan agama, secara ideal pendidikan Islam berfungsi dalam penyiapan SDM yang berkualitas tinggi, baik dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam hal karakter, sikap moral dan penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Singkatnya, pendidikan Islam secara ideal berfungsi membina dan menyiapkan anak didik yang berilmu, berteknologi, berketrampilan tinggi dan sekaligus beriman dan beramal sholeh.

Pendidikan Islam, dalam berbagai tingkatannya mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.

Pada satu pihak, penguatan dan pemantapan kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional tentu saja harus kita syukuri. Karena itu, secara implisit juga menunjukkan pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa. Tetapi pada pihak lain pemantapan kedudukan pendidikan Islam itu sekaligus merupakan tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam itu sendiri.

Globalisasi sebenarnya bukanlah fenomena baru sama sekali bagi masyarakat-masyarakat muslim Indonesia, pembentukan dan perkembangan masyarakat muslim Indonesia bahkan berbarengan dengan berbagai gelombang global secara konstan dari waktu ke waktu, sumber

globalisasi itu adalah Timur Tengah, khususnya mula-mula Makkah dan Madinah dan sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga Kairo, karena itu seperti biasa diduga globalisasi ini lebih bersifat religio intelektual, meski dalam kurun-kurun tertentu juga di warnai oleh semangat religio politik.

Melalui kajian Islam sebagai disiplin keilmuan maka peran kita sebagai sarjana pendidikan sebagai tenaga pendidik dengan kualifikasi tinggi yang setidaknya-tidaknya mengandung 3 kompetensi yaitu:

Pertama: Kompetensi akademik, berkaitan dengan kiat dan kemampuan metodologi keilmuan dalam rangka penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kedua: Kompetensi profesionalisme, berkaitan dengan wawasan perilaku dan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut bidangnya dalam realitas kehidupan bermasyarakat.

Ketiga: Kompetensi Leadership, berkaitan dengan wawasan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengerahkan orang lain kepada kondisi lebih baik dan bermanfaat dalam kehidupan individu maupun kolektif.

Menyadari keadaan yang kurang kondusif pada potret buram pendidikan Islam, sudah saatnya umat Islam diseluruh dunia untuk melakukan segala upaya untuk keluar dari kemelut krisis ini. Upaya-upaya yang penting dan strategi yang harus di lakukan oleh umat Islam antara lain:

Pertama, menerapkan secara konsisten nilai-nilai dasar integralistik Islam kedalam seluruh bangunan visi, orientasi dan misi pendidikan sehingga format penataan dan penyelenggaraan sistem pendidikan Islam mempunyai fondasi teologis filosofis sebagai titik pangkal dan sekaligus sebagai tujuan akhir dari pendidikan Islam itu.

Kedua, melakukan pembaharuan kembali (reorientasi, reformasi, rekonstruksi, reaktualisasi dan restrukturisasi) secara kontinyu terhadap sistem pendidikan Islam yang sudah dirasa kurang memadai atau tidak relevan lagi dengan denyut perkembangan zaman. Pembaharuan dan modernisasi sistem pendidikan Islam ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini sehingga dengan demikian sistem pendidikan Islam selalu up to date (sesuai dengan kemajuan zaman) dan tidak out of date (ketinggalan zaman).

Ketiga, melakukan segala daya dan upaya pembaharuan secara kesinambungan terhadap seluruh muatan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi) agar muatan kurikulum tadi sesuai dengan gerak perkembangan terkini di bidang sains dan teknologi.

Keempat, secara konsisten tetap mempertahankan dan menyelenggarakan program studi-studi keIslaman yang bersifat khas dengan selalu meningkatkan kedalam bobot materi dan mutu penyajiannya dengan metode pengajaran dan pendidikan yang terpadu.

Kelima, mengembangkan tradisi akademik, budaya ilmiah dan mental ilmu dikalangan staf pengajar dan para pelajar/mahasiswa. Karena salah satu aspek kemajuan pendidikan Islam bisa diukur dari kekuatan tradisi akademik, budaya ilmiah dan mental ilmu yang dimiliki oleh para staf pengajar dan para pelajar dan mahasiswa.

Namun demikian, pembaharuan pendidikan Islam yang di gagas oleh Azyumardi Azra adalah pembaharuan yang didasarkan pada ajaran Islam yang prinsipnya sangat modern, yang di harapkan mampu tampil kedepan dan sekaligus bisa menjawab tantangan zaman.

2. Pembaruan Pendidikan Pesantren dan Surau

Selama kurang lebih lima abad, pesantren berkiprah ditengah-tengah perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dan telah memberikan sumbangan besar dalam bidang keilmuan, kemsyarakatan, kenegaraan dan lain sebagainya. Pesantren disegani dan di hormati. Kesaktian pesantren selama itu lebih tertumpu pada kebesaran dan kualitas "kiai pengasuhnya" dari pada kelembagaannya sendiri:

- Dengan kadar keilmuannya yang luas dan dalam.
- Dengan kadar kearifan wataknya yang disegani.
- Dengan kadar sikap laku amaliahnya yang diteladani.
- Dengan kadar keikhlasan juangnya yang dirasakan.
- Dengan kadar pengayomannya kepada umat setiap saat.

Sosok "Kiai Pengasuh Pesantren" menjadi parameter hampir dalam segala sisi kehidupan umat.

Figur kiai yang seperti itu sekarang sudah mulai jarang ditemukan di dalam pesantren sendiri, yang ada umumnya tinggal lembaganya dengan segala perangkat institusinya. Dan kalau toh masih ada, itu tinggal beberapa saja yang dapat dihitung dengan jari. Pesantren ternyata banyak yang gagal melestarikan bobot kepemimpinannya sendiri, lemah dalam menyiapkan suksesi "tokoh Kiai Pengasuh" yang setaraf dengan pendahulunya, apalagi yang melebihinya.

Dilain pihak masyarakat masih mengharapkan kemampuan fungsi dan peranan pesantren seperti dulunya, tanpa banyak mengetahui bahwa sebenarnya apa yang diharapkan itu sedang mengalami kemusykilan berat. Beban yang dipikulnya kepada pesantren tambah berat, tapi daya angkatnya terasa tambah menyusut. Sumber penyusutan daya angkat tersebut berasal dari makin jaranginya "Kiai Pengasuh" yang memiliki bobot keilmuan, kearifan, keteladanan, keikhlasan maupun pengayoman kepada umatnya.

a. Pesantren Sebagai Sub Sistem

Kenyataan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan non-pesantren di tengah-tengah kehidupan bangsa dan umat lain, secara langsung menempatkan pesantren sebagai lembaga yang tersaingi dan mengharuskannya berada dijalur kompetisi kultural (munafasah tsaqafiyah) pesantren menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan masa pengabdian yang cukup serta jumlahnya yang sangat besar yaitu lebih dari sebelas ribu pesantren se-indonesia, tentunya tidak mudah tersingkirkan dari jalur kompetisi tersebut. Namun pesantren juga harus paham posisinya sebagai sub sistem dari suatu sistem pendidikan nasional yang mencakup macam-macam sub sistem lainnya. Dalam posisi demikian pesantren seharusnya lebih memahami secara tepat:

- Apa hakekat tujuan misinya?
- Apa hakekat tugas yang diembannya?
- Apa masalah-masalah dasar yang dihadapinya?
- Apa kekuatan yang masih dimilikinya?
- Apa kelemahan yang sedang dialaminya?
- Apa peluang yang masih dimungkinkannya?
- Apa langkah-langkah kongkrit yang dapat dilakukannya?

Sikap terpaku pada "kebanggaan masa lalu" (syarafin qadim) saja, tentunya tidak akan memecahkan masalah, tanpa disertai kemampuan kreatif membangun prestasi-prestasi baru sesuai dengan perkembangan waktu (agama linafsihi syarafan jadidan). Sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan masih menjadi harapan masyarakat, peluang untuk bangkit kembali (revival) masih cukup besar, asal jangan keburu masyarakat sendiri terpaksa mengambil pilihan lain, karena merasa terlalu lama menunggu kebangkitan pesantren sebagai pendidikan non formal yang tidak kunjung bangkit seperti yang diharapkan.

Dalam sistem pendidikan nasional yang ada sekarang apapun kekurangannya, kondisi yang dihadapi pesantren (sebagai sub sistem) masih jauh lebih bagus dari pada kondisi kependidikan masa kolonial dulu. Kalau masa kolonial dulu pesantren mampu berkiprah dengan baik, mengapa dalam kondisi kependidikan yang lebih bagus tidak mampu berkiprah lebih baik?.

b. Prioritas Pembinaan Pesantren

1) Kejelasan tujuan pendidikan pesantren.

Pesantren adalah pendidikan non formal, yang bertujuan utama menyelenggarakan pendidikan agama, yang memberikan pendidikan kepada masyarakat agar mampu menjadikan dirinya sebagai "khaira ummah" yaitu umat yang baik.

Mengingat masalah "ad-din" mempunyai kaitan langsung dengan kehidupan ummatnya, maka bertafaquh fiddin harus memenuhi kapasitas yang diperlukan oleh realitas ummatnya menghadapi berbagai macam kebutuhan dan kemajuannya.

2) Tugas besar pesantren

Sebagai lembaga keagamaan dan keilmuan, pesantren bertugas menjadi "pelestari keilmuan Islam" secara utuh dan menyeluruh dan bukan terbatas pada fiqh dan tasawuf, tetapi juga

tafsir, hadist, sejarah umat Islam, filsafat Islam dan lain sebagainya.

Dan sebagai pendidik masyarakat, pesantren bertugas menjadi kekuatan pendorong atau motivator, penggerak atau dinamisator dan pembaharu atau innovator kehidupan masyarakatnya.

3) Masalah-masalah dasar yang dihadapi

Meningkatkan kualitas ummat, agar mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah kemajuan keilmuan, teknologi dan ekonomi yang sedang dipacu. Di lain segi pesantren juga diharapkan pada tugas membimbing dan menyertai umat dalam perjalanan batinnya, agar tidak larut dalam kehidupan materi. Secara introvert (kedalam) pesantren dituntut menata daya kemampuan menangani masalah yang tambah kompleks.

4) Kekuatan yang dimiliki

Mitos kebesaran pesantren belum sirna dihati masyarakat dan kebesaran prestasi masa lalu masih mengayomi lembaga pesantren. Nilai-nilai luhur yang selama ini dikembangkan pendidikan pesantren, masih mampu memberikan dukungan citra pesantren dalam kehidupan bangsa. Jumlah kelembagaan yang eksis di tengah-tengah masyarakat dalam waktu yang lama, memberikan kekuatan pesantren sebagai lembaga yang akrab dan terpisahkan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Penghormatan masyarakat atau ummat kepada figur ulama masih cukup tinggi, dan suara ulama sebenarnya masih di dengar oleh mayoritas masyarakat ummat. Dukungan pemerintah terhadap eksistensi dan pengembangan pesantren memberikan situasi yang kondusif terhadap pendidikan pesantren.

5) Kelemahan yang di alami

Sumber kelemahan justru pada kurang tersedianya "Kiai Pengasuh" yang memadai, sebagai potensi utama yang mengangkat martabat pesantren, baik sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga perjuangan dan pelayanan. Kemandekan wawasan keilmuan, termasuk keilmuan agama yang jadi menyempit. Sumber dana yang terbakukan, menambah keterbatasan pesantren dalam upayanya mengembangkan peran pesantren. Banyak Waqaf yang kurang efektif dan efisien pengelolaannya, karena pemahaman tentang waqaf yang serta pendayagunaannya itu sendiri masih rancu. Sulitnya membuat model pengembangan, mengingat pesantren dalam hitam putihnya lebih banyak tergantung pada kemauan pemiliknya, dalam hal ini para kiyai pengasuh dan ahli warisnya atau ahlul bait bukan pada kebutuhan masyarakatnya.

Keseriusan para pemangku atau pengasuh pesantren sendiri dalam penyediaan tokoh ulama sebagai "Kiyai Pengasuh" yang

memadai dan memandangnya sebagai "amanat" kepesantrenan. Dimana perlu mengadakan pendidikan khusus atau semacam pasca kiyai di selenggarakan oleh lingkungan pesantren sendiri, dengan ada bantuan dari luar jika diperlukan.

Prinsip "Seorang kiyai pemangku pesantren harus siap melahirkan (bukan dalam arti biologis) kiai baru yang sanggup melanjutkan amanat pesantren" harus diwujudkan. Keterbukaan peserta menyerap kemajuan keilmuan dan teknologi serta manajemen modern memang di perlukan, tetapi jangan sampai semangat penyerapan tersebut justru menggusur nilai-nilai kepribadian kepesantrenan sendiri, sehingga pesantren akan kehilangan citranya yang ingin dipertahankan.

Kepekaan pesantren terhadap perubahan masyarakat pendukungnya harus dijaga baik-baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan wawasan antara masyarakat dengan pesantrennya tambah lebar, sebab eksistensinya pesantren tidak bisa lepas dari penghargaan dan dukungan masyarakat kepadanya. Pencarian titik-titik temu antara sekian banyak ragam pesantren harus digalakkan, sebab kenyataannya beberapa pemikiran sementara pesantren yang cukup brilian belum mampu menyentuh sekian banyak pesantren yang lain, dan malah menimbulkan salah faham, mungkin karena lemahnya instrumen dan sistem komunikasi dan informasi yang ada.⁵¹

c. Tiga kendala pesantren

Banyak masalah-masalah yang dihadapi dunia pesantren dalam menatap masa depannya. Namun setidaknya-tidaknya ada tiga masalah yang merupakan kendala yang benar-benar dihadapi dunia pesantren dan seluruhnya menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, yaitu:

- 1) Sejauh mana pesantren masih tetap sanggup melahirkan 'ulama atau kiyai yang mempunyai bobot keilmuan dan kepribadian yang mampu menjadi panutan ummatnya yang sedang berkembang maju ini.
- 2) Sejauh mana pesantren mampu mempunyai sistem pendidikan dan kajian ilmu-ilmu keIslaman dan kemasyarakatan, dengan wawasan yang mampu memberikan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- 3) Sejauh mana pesantren sanggup menempatkan dirinya sebagai pusat pelayanan masyarakat dan mampu membimbing masyarakatnya bergerak maju tanpa kehilangan identitasnya sebagai "ummatan- muslimah".

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, maka dunia pesantren memang diharapkan melakukan kajian-kajian ulang baik secara kelembagaan, keilmuan maupun kemasyarakatannya.⁵²

⁵¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Lantabora Press, jakarta, 2004, hlm. 279-285.

⁵² Muhammad Tholhah Hasan, 2004, hal. 294-295.

Beberapa hal yang terpenting tentang pembaharuan pendidikan Pesantren diantaranya yaitu:

Pertama, Pesantren harus melaksanakan pembangunan dan pembaharuan terhadap pemikiran dalam memahami ajaran Islam, antara lain dengan mengembangkan teologi yang bercorak rasional melalui pengajaran filsafat dan penerapan metode dialog.

Kedua, Pesantren perlu mengadopsi dan mengembangkan wawasan berpikir keilmuan dan sistem pendidikan Nasional, yaitu dengan menerapkan metode berpikir deduktif, induktif, kausalitas dan kritis.

Ketiga, Pesantren perlu mengembangkan konsep atau wawasan baru mengenai asrama, sebagai salah satu ciri khasnya yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga mampu mengembangkan ilmu-ilmu yang diasuhnya.

Keempat, dalam rangka mengembangkan identitas pesantren dalam zaman modern ini, maka dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya pesantren tidak mengambil ilmu pengetahuan yang hanya bersumber pada hukum alam, tetapi harus bersumber pada Sunnatullah.

Kelima, Pesantren perlu menjadikan dirinya sebagai pusat studi pembaruan tarekat.

Keenam, perlu adanya kelompok ahli yang dihasilkan oleh Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya untuk membantu Pesantren di dalam mengembangkan wawasan berpikir rasional dan ilmiah.

Kesimpulan dan adanya suatu pembaharuan pendidikan Pesantren tersebut di atas, bahwa disamping memiliki nilai-nilai yang positif, Pesantren juga memiliki nilai-nilai yang kurang positif, yaitu nilai yang kurang sejalan dengan tuntutan masyarakat modern. Pesantren masih bertumpu pada corak pemikiran tradisional. Menurutnya corak berpikir yang demikian itu harus diganti dengan corak berpikir modern.

Gagasan pembaruan pendidikan Islam yang dikemukakan Azyumardi Azra juga mencakup pendidikan pesantren dan surau, dalam konteks pesantren yang ada di Indonesia, Azyumardi mencoba menganalisis tentang sebab-sebab mengapa pesantren dapat terus bertahan dalam menghadapi tantangan modernisasi, sebab-sebab tersebut menurut pengamatan Azyumardy adalah karena pesantren mampu merespon perkembangan yang terjadi di sekitarnya tanpa meninggalkan ciri aslinya.

Respon tersebut antara lain dengan cara mendirikan Madrasah didalam komplek pesantren masing-masing, bahkan juga dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada di bawah sistem Departemen pendidikan dan kebudayaan, dengan kata lain pesantren bukan hanya mendirikan Madrasah, tetapi juga sekolah-sekolah umum, yang mengikuti sistem kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya mengenai surau Azyumardy mengatakan bahwa surau dengan sistem pendidikannya yang khas kembali mencapai puncak

kejayaannya setidaknya hingga dasawarsa kedua abad ke-20, ketika pendidikan skuler Belanda dan Madrasah diperkenalkan kelompok muslim modernis. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pendidikan surau tetap memainkan peran penting bagi masyarakat Islam Minagkabau sepanjang abad ke-19. Namun dalam masa kemerdekaan, hanya beberapa surau saja yang bertahan, bahkan di masa lebih akhir sebagiannya mulai menamakan diri sebagai pesantren. Sedangkan surau sendiri kemudian lebih sekedar tempat belajar membaca Al-Qur'an atau arena sosialisasi anak-anak dan remaja.

Motivasi yang demikian kuat mendorong Azyumardi Azra untuk melakukan modernisasi pendidikan Islam sebagaimana tersebut diatas adalah karena lingkungan dimana ia hidup dan menimba ilmu pengetahuan yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta pendidikannya yang ia dapat dari negara berada yang amat maju, yakni Colombia University, Amerika Serikat adalah berada dalam suasana modernisasi. Sejak sebagai mahasiswa Azyumardy sudah amat mendalami ide-ide modern yang dikemukakan oleh para tokoh pembaru Islam dari berbagai belahan dunia.

Di dalam ide-ide tersebut dapat dijumpai ide-ide pembaruan pendidikan Islam. Hal ini terjadi karena pada umumnya para tokoh pembaru menggunakan pendidikan sebagai wahana untuk melakukan transmisi pembaruan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa eksistensi dan fungsi lembaga pendidikan Islam di era Modern amat bergantung kepada sejauh mana lembaga pendidikan tersebut mampu menjawab tantangan tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman. Pembahasan ini secara implisit menyarankan ,bahwa pesantren perlu mengkaji ulang secara cermat dan hati-hatiberbagaigagasan untuk mengorientasikan pesantren pada tantangan "kekinian". Sebab,bukan tidakmungkin orientasi semacam itu akan menimbulkan implikasi negatif terhadap eksistensi dan fungsi pokok pesantren itu sendiri. Harus dipahami,bahwa dengan menyatakan hal ini,tidak berarti pesantren harus tidak peduli sama sekali terhadap perkembangan diluar dunianya. Sebaliknya ,pesantren harus menumbuhkan apresiasi yangsepatutnya terhadap semua perkembangan yang terjadi di masa kini dan mendatang, sehingga dapat mereproduksi (calon) 'ulama yang berwawasan luas

Dilihat dari konteks perkembangan dunia yang semakin terdiferensiasi,maka fungsi pokok pesantren yang disebutkan tadi justru semakin relevan .Ditengah arus globalisasi nilai-nilai yang semakin kencang, aktualisasi peran pesantren sebagai "cultural broker" nilai-nilai kaum santri bahkan kian dibutuhkan. Dan dengan demikian,pesantren boleh didirefensasikan sebagai salah satu lembaga Islam terpenting yang berfungsi sebagai "guardian of Islamic faith".Bahkan, sesuai dengan gelombang santrinisasi yang terus berlangsung dalam masyarakat muslim Indonesia belakangan ini, harapan kepada pesantren semakin meningkat. Peran yang diharapkan dan dimainkan pesantren semakin banyak, pesantren diharapkan bukan hanya mampu menjalankan fungsi

tradisionalnya seperti paparan diatas dan menjadi pusat pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, tetapi bahkan juga peran-peran sosial-sosial lainnya seperti menjadi ”pusat rehabilitasi sosial”.

Dalam konteks terakhir ini, bagi banyak keluarga yang mengalami kegoncangan atau krisis sosial keagamaan, pesantren merupakan alternatif terbaik untuk menyelamatkan anak-anak mereka.

Dalam kerangka pembaharuan dan modifikasi pesantren, tidak sedikit pesantren yang kemudian mendirikan madrasah bahkan mendirikan perguruan tinggi tentu hal ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis operasionalnya, bukan substansi pendidikan pesantren itu sendiri karena apabila improvisasi itu menyangkut substansi pendidikan maka pesantren yang mengakar ratusan tahun lamanya akan tercabut dan kehilangan ilang fatal sebagai penopang moral yang menjadi citra utama pendidikan pesantren. Sungguhpun demikian, upaya modifikasi dan pembaharuan sistemik pendidikan pesantren tidaklah mudah. Setidaknya ada empat faktor yang menghambat upaya ini, yaitu: hambatan psikologis, politis, pedagogis, dan dana. Secara psikologis pembaharuan meniscayakan peran kiyai yang dianggap sebagai figur paling menentukan dalam pesantren, apalagi kiyai bukan saja pimpinan pesantren, melainkan juga pemilik pesantren itu sendiri. Jika demikian, ini akan melahirkan kemungkinan ganda: pembaharuan akan mudah dilakukan apabila itu direstui kiyai atau sebaliknya, pembaharuan akan gagal sama sekali apabila kiyai menolaknya. Pembaharuan itu akan semakin sulit dilakukan apabila isu pembaharuan itu muncul dari kelompok lain yang tidak seirama dengan kelompoknya, ditengah munculnya frakmentasi politik yang terjadi di dunia pesantren, maka secara politis upaya pembaharuan itu bisa dipastikan akan gagal. Demikian pula faktor pedagogik dan dana. Secara pedagogik, pesantren lebih mengedepankan pengasahan hati dan otak, sementara aspek vokasional terabaikan. Ketika kurikulum ketrampilan dipaksakan masuk dalam kurikulum pesantren maka seolah itu hanya pelengkap dan bukan bagian integral dari kurikulum pesantren secara keseluruhan. Belum lagi faktor dana semakin pesantren mengembangkan infra dan supra strukturnya, maka semakin besar pula kebutuhannya pada dana, sementara pada saat yang sama masyarakat yang menjadi soko guru pertumbuhan pesantren belum menemukan pijakan ekonomi yang mapan.

3. Pembaharuan IAIN

Tidak hanya pada lembaga pendidikan dasar dan menengah, perhatian Azyumardi dalam bidang pembaruan pendidikan juga terjadi pada lembaga pendidikan tinggi. Untuk itu ia mengemukakan gagasan dan pemikiran tentang pembaharuan IAIN dan pengembangan intelektual muslim serta berbagai aspeknya yang terkait.

Berkaitan dengan pengembangan IAIN, ia mengajukan rekomendasi berupa:

- a. Reformulasi tujuan IAIN, meskipun IAIN diharapkan menjadi pusat pengembangan pemikiran Islam, sampai saat ini IAIN lebih berfungsi

sebagai wadah pembinaan "calon pegawai" dan "guru" ketimbang pemikir intelektual Islam. Dalam hubungan ini IAIN lebih berfungsi sebagai "training center" ketimbang "center of learning and riseach" atau "center of Islamic thought". Jika IAIN karena faktor-faktor tertentu tetap tidak bisa melepaskan diri dari fungsinya sebagai "training center" seyogyanya juga melakukan langkah-langkah yang lebih konsisten dan kongkrit. Untuk itu Azyumardi mengharapkan agar selain sebagai training center, juga lebih memfungsikan diri sebagai pusat penelitian dan pengembangan pembaruan dan pemikiran Islam.

- b. Restrukturisasi kurikulum. Untuk ini Azyumardi mengatakan sebagai pusat keilmuan dan penelitian Islam, seyogyanya jurusan-jurusan di IAIN yang berkenaan dengan disiplin-disiplin keagamaan selain lebih menekuni bidang prinsip-prinsip dari kerangka teori ilmu-ilmu umum. Ini sekaligus berarti peninjauan ulang terhadap mata-mata kuliah umum, yang tidak atau sedikit sekali mempunyai relevansi dengan Islamic studies yang sering hanya menjadi beban yang cukup berat bagi mahasiswa yang pada gilirannya menghalangi terjadinya studi dan penelitian yang intensif terhadap subjek-subjek Islamic studies yang justru pokok itu. Kenyataan ini bukan hanya terjadi pada program S1, tetapi juga pada program S2 dan S3 yang justru diharapkan sebagai wadah pengkajian lebih intensif dan mendalam atas subjek-subjek Islamic studies. Ini tak berarti bahwa subjek-subjek umum tak penting: hendaknya diciptakan sistem dan mekanisme sendiri dalam kurikulum yang memberikan peluang bagi pemberian subjek-subjek umum. Sekarang ini terlihat adanya kecenderungan terjadinya tumpang tindih subjek-subjek umum dalam berbagai strata pendidikan yang dilaksanakan.
- c. Simplikasi beban perkuliahan. Azyumardi Azra melihat bahwa akibat penetrasi subjek-subjek yang tidak terlalu relevan dengan Islamic studies, maka beban perkuliahan menjadi amat berat. Overload ini juga terjadi pada program pasca sarjana. Idealnya beban mahasiswa setiap semester tidak lebih dari 5 mata kuliah. Hanya dengan tingkat beban seperti inilah bias dilakukan studi yang lebih intensif atas mata-mata kuliah yang diambil.
- d. Dekompartementalisasi. Menurutnya dewasa ini terjadi kompartementalisasi yang cukup parah di IAIN dalam bentuk fakultas-fakultas dan jurusan sejak mahasiswa melangkah ke gerbang perguruan tinggi ini. Akibat kompartementalisasi ini mahasiswa cenderung mempunyai pemahaman yang terpilah-pilah tentang Islam. Mereka yang memasuki fakultas usuluddin misalnya, kurang apresiatif terhadap syari'ah "mereka yang memasuki fakultas tarbiyah, sangat lemah dalam bidang pemikiran kalam atau filsafat Islam dan seterusnya. Untuk penguasaan yang komprehensif dan integral terhadap Islam, seyogyanya tidak ada pembagian ke fakultas dan jurusan setidak-tidaknya dalam dua tahun pertama program S1. Pada tingkat ini, semua mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama. Dan

pada masa-masa ini pula diberikan mata kuliah umum, yang berguna untuk melihat dan mengkaji serta mendekati Islam sebagai suatu objek studi. Fakultas dan jurusan baru hadir pada tahun ketiga atau keempat (antara semester lima sampai delapan). Pada masa-masa inilah mahasiswa-mahasiswa yang memang mempunyai minat-minat tertentu dapat mengarahkan diri kedalam bidang-bidang khusus.

- e. Liberalisasi sistem SKS untuk ini Azyumardy Azra menyarankan agar mahasiswa diberi kebebasan memilih bidang keilmuan yang akan ditekuninya. Demikian pula, dosen hendaknya diberi peluang untuk menawarkan mata kuliah baru, sesuai dengan keahlian dan tuntutan perkembangan keilmuan dan zaman. Dengan adanya kebebasan ini, setidaknya-tidaknya mulai pada tahun ketiga (semester 5), pada gilirannya, tidak hanya akan mendorong pertumbuhan minat dan kreatifitas mahasiswa dalam mengembangkan diri mereka sendiri, tetapi juga merangsang dosen untuk terus meningkatkan kualitas mereka. Dengan demikian akan tercipta komunitas, intelektual, dimana setiap individu yang terlibat di dalamnya berusaha secara kontinyu mengembangkan minat dan kualitasnya.

BAGIAN YANG KEIV.PENUTUP.

Setelah penulismenguraikantentang pengertian pembaharuan pendidikan Islamhasil pemikiranAzyumardi Azra di bidang pendidikan.Maka dalam bagian yang terakhir ini penulis akankemukakan kesimpulan dari uraian diatas, serta akan penulis kemukakan sumbangan pemikiran yang berupasaran-saran sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah-masalah tersebut.

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Pemikiran pendidikan Azyumardi Azra di dalam buku pendidikan Islam tradisi dan modernisasi menuju Millenium Baru yaitu meliputi (1) Modernisasi pendidikan Islam (2) Pembaharuan pendidikan pesantren dan surau (3) Pembaharuan IAIN dan pengembangan intelektual muslim.
1. Menurut Azyumardi Azra strategi yang dilakukan pendidikan Islam dalam rangka memaksimalkan pembaharuan yaitu antara lain dengan mengembangkan kajian Islam sebagai disiplin keilmuan universitas meningkatkan pengetahuan, bukan hanya untuk sekedar diketahui dan dikembangkan melainkan sekaligus di praktekkan dalam kehidupan nyata dengan demikian sumber daya manusia yang berkualitas bisa menghadapi persaingan global yang semakin tajam dalam perkembangan zaman.
 2. Peranan pemikiran pembaharuan pendidikan Azyumardi Azra dalam menghadapi permasalahan pendidikan Islam dewasa ini tampak dalammodel pembaharuan yang di kerjakan di IAIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, terutama dalam perubahan status IAIN menjadi UIN dan berbagai komponen pendidikan, mulai dari visi dan misi, tujuan, kurikulum, kompetensi dosen, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan.

3. Upaya pembaharuan pendidikan dalam Islam akhirnya ditujukan untuk membangun peradaban umat manusia yang didukung oleh pribadi-pribadi yang bermutu, salah satu aspek peradaban itu adalah tradisi literatur yang berkesinambungan dan terakses oleh banyak pihak, dengan kata lain pembaharuan pendidikan Islam harus meliputi usaha pengayaan koleksi literature yang disertai system manajemen informasi yang efektif dan terkait dengan proses pendidikan

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang perlu penulis sampaikan sebagai langkah alternatif yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pendidikan Islam di era modern ini, sistem lembaga pendidikan tinggi Islam harus diperbarui, kurikulum harus ditingkatkan dengan memasukkan topik-topik beragam, berbobot dan menarik pengadaan staf pengajar secara kualitatif dan kuantitatif, sebagian mereka dapat di kirim ke Universitas-Universitas besar di Barat, dimana mereka akan mendapatkan pelatihan dalam pengajaran dan metodologi penelitian, interpretasi dan analisis, dengan begitu mereka dapat mengetahui perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern saat ini.
2. Mengembangkan bidang study Islam kepada bidang ilmu sosial lainnya sekaligus mengembangkan ilmu-ilmu pasti dengan pengembangan demikian, program study Islam tidak hanya di pandang sebagai program teologi Islam atau sekedar penelitian hukum Islam saja.
3. Menata kembali sistem pendidikan nasional yang integral antara agama dan umum. Keduanya harus berjalan seiringan, tanpa dikotomis. Jalan terbaik yang bias ditempuh adalah pada saat proses pembelajaran dilakukan. Tatkala guru melaksanakan proses belajar mengajar pada suatu bidang keilmuan umum tertentu, ia harus juga mengaitkannya dengan dimensi religius peserta didiknya. Demikian pula sebaliknya, untuk memainkan peran itu, seorang pendidik dituntut untuk memiliki wawasan luas, baik terhadap materi yang akan diajarkan, maupun sisi-sisi socialreligius.
4. Melakukan “Pembongkaran dan Rekonstruksi ulang” Sistem pendidikan nasional dengan roh ajaran Islam, baik dalam dataran teoritis, histories maupun praktis, terutama bagi lembaga pendidikan Islam. Upaya ini akan meletakkan Islam dalam spectrum yang lebih luas, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam dalam makna yang lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Nuh, *Agama Dalam Pembahasan*, Jakarta, 1961.
- Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia*. P.T. Raja Grafindo persada Jakarta, 2005.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada 2005.
- Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada 2003.
- Abdur Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, misi dan Aksi*, Pt Gema windu , 2001.
- Abdur Rahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta, Leppenasa, 1981.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- A. M. Saefuddin et.al, *Desekularisasi pemikiran*, Mizan, 1993.
- A. Malik Fajar, *Plat form Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Logos, 2001.
- Azizy A. Qodri, *Melawan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, 2004.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, Mizan , 2002.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000.
- Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Badri Yatim Dan Hamid Nasuhi, *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam Sejarah Dan Profil Pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta: 1957-2002.
- Conny R. Semiawan, *Analisa SWOT*, Pt Raja Grafindo Persada, 2005.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta. 1988.
- Faisal Ismail, *Masa Depan Pendidikan Islam*, Pt Bakti Aksara Persada 2003.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, UGM Pers. Cet. 7 Jakarta, 1995.
- HAR. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta: 2004.
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1980.
- Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan*, Al Husna, 2000.
- Helen Connell, *Reformasi Pendidikan*, Logos, 2003.
- Herry Noer Ali, *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*, Cv, Triasco, 2003.
- Herry Noer Ali dan HM Suparta, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Amisco, Jakarta; 2003.
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam*, Logos, Jakarta; 2001.
- Imam Bernadib, *Pemikiran Tentang Pendidikan*, Andi Ofset Jakarta, 1983.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Marwan saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, CV AMISCO, Jakarta, 1996.
- Marwan Saridjo, et. al. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta, Dharma Bhakti, 1982.